

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Revolusi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa penting dan menentukan bagi eksistensi bangsa Indonesia. Manuel Kaisiepo mengemukakan bahwa periode revolusi Indonesia dimulai sejak pembacaan Proklamasi hingga Konferensi Meja Bundar pada akhir tahun 1949.¹ Periode “pendek” ini dipenuhi dengan perjuangan,² konflik politik,³ pemberontakan,⁴ serta dinamika politik dan kekerasan di tingkat lokal.⁵ Oleh karena itu tidak aneh apabila Sartono Kartodirdjo menyebut revolusi Indonesia sebagai zaman “gegeran” yang ditandai dengan aksi-aksi “srobotan”,

¹ Manuel Kaisiepo, “Murba di Tengah Persaingan: Tan Malaka dalam Revolusi Kemerdekaan Indonesia 1945-1949”, *Prisma* no. 9, 1982, hlm. 72.

² Pertikaian antara Belanda dengan kekuatan Republik digambarkan dengan sangat baik dan panjang lebar oleh A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, Jilid I-XII, (Bandung: Angkasa, 1977 dan 1978); lihat pula Pierre Heijboer, *Agresi Militer Belanda: Memperebutkan Pending Zamrud Sepanjang Katulistiwa 1945-1949*, (Jakarta: Grasindo, 1998).

³ Uraian mengenai kekuatan oposisi pada masa revolusi dapat dilihat pada karya Ben Anderson, *Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa, 1944-1946*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan: 1988); lihat pula Julianto Ibrahim, “Benturan di Simpang Kiri: Kompetisi dan Konflik antara Oposisi Kiri di Surakarta Pada Masa Revolusi, *Skripsi S1*, Fakultas Sastra UGM, 1995.

⁴ Onghokham, “Pemberontakan Madiun 1948: Drama Manusia dalam Revolusi”, *Prisma* no. 7, 1978; lihat pula Soe Hok Gie, *Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan: Kisah Pemberontakan Madiun September 1948* (Yogyakarta: Bentang, 1997).

⁵ Bambang Purwanto, Roel Frakking, Abdul Wahid, Gerry Van Klingen, Martijn Eickhoff, Yulianti, Ireen Hoogenboom (eds.), *Revolutionary Worlds: Local Perspectives and Dynamics During the Indonesian Independence War, 1945-1949*, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2023).

“gedoran”, “pendaulatan” di samping perjuangan. Sartono melihat revolusi Indonesia sebagai proses politik yang penuh konflik antargolongan, pemberontakan massa terhadap tatanan yang ada dan hal ini hampir tidak pernah terjadi sebelumnya.⁶ Onghokham menambahkan bahwa dalam periode revolusi ini seluruh masyarakat Indonesia dilibatkan dalam politik. Tidak hanya tenaga dan pikiran, tetapi mempertaruhkan juga harta benda dan sumber daya lainnya.⁷

Revolusi Indonesia merupakan ajang memperebutkan “ruang” kepentingan, yang memunculkan kontestasi dan polarisasi di antara kelompok-kelompok kepentingan.⁸ Dengan banyaknya konflik, revolusi Indonesia menciptakan kondisi serba darurat yang disebabkan oleh masih lemahnya posisi dan otoritas politik Republik Indonesia. Republik Indonesia yang baru berdiri itu, di satu sisi harus mampu menghadapi Belanda yang ingin menjajah kembali,⁹ tetapi di sisi lain juga harus mampu menjalankan roda

⁶ Sartono Kartodirdjo, “Wajah Revolusi Indonesia Dipandang dari Perspektivme Struktural”, *Prisma* no. 8, 1981, hlm. 3.

⁷ Onghokham, “Revolusi Indonesia: Mitos dan Realitas”, *Prisma* no. 8, 1985.

⁸ Banyak sekali kelompok kepentingan yang berkontestasi pada masa revolusi, yaitu pemerintah republik, Belanda, kelompok oposisi pimpinan Tan Malaka, kaum komunis Indonesia, kelompok-kelompok sipil bersenjata, kaum bandit, dan lain sebagainya. Lihat George Turnan Kahin, *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik: Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, (Surakarta: Pustaka Sinar Harapan dan UNS Press, 1995).

⁹ Belanda mempunyai kepentingan yang besar terhadap revolusi Indonesia. Bagi Belanda, revolusi Indonesia sebagai suatu zaman yang merupakan kelanjutan dari masa lampau. Tujuan Belanda adalah menghancurkan sebuah negara yang dipimpin orang-orang yang bekerja sama

pemerintahan,¹⁰ “menjinakkan” kekuatan-kekuatan politik yang saling bersaing untuk berkuasa,¹¹ dan “menghadirkan dirinya” di tengah rakyat untuk menjamin keamanan dan kesejahteraannya.¹²

Pada masa awal revolusi, Republik Indonesia yang masih muda berada dalam bayang-bayang perpecahan, tertatih-tatih dalam mengonsolidasikan diri, dan kesulitan dalam mempertahankan eksistensinya. Justus M. Van der Kroef mengatakan bahwa Republik masih muda ini berada dalam kondisi yang hampir kacau, gang dan bandit berkeliaran, kekacauan di

dengan Jepang dan memulihkan suatu rezim kolonial yang menurut keyakinan mereka telah dibangun selama 350 tahun. Lihat M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 318; lihat pula J.A. de Moor, *Jenderal Spoor: Kejayaan dan Tragedi Panglima Tentara Belanda Terakhir di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2015).

¹⁰ Julianto Ibrahim. “War Logistics in Revolutionary Central Java” in Bambang Purwanto, Roel Frakking, Abdul Wahid, Gerry van Klinken, Martijn Eickhoff, Yulianti, Ireen Hoogenboom (eds.), *Revolutionary Worlds: Local perspectives and Dynamics During The Indonesian Independence War, 1945-1949*. (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2023), hlm. 157-159; lihat pula Taufik Abdullah dan A.B. Lopian (eds.), *Indonesia Dalam Arus Sejarah: Perang dan Revolusi, Jilid 6*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2012), hlm. 121-312.

¹¹ Lihat Roel Frakking and Abdul Wahid, “Revolutionary World: An Introduction” in Bambang Purwanto, Roel Frakking, Abdul Wahid, Gerry van Klinken, Martijn Eickhoff, Yulianti, Ireen Hoogenboom (eds.), *op. cit.*, hlm. 14; lihat pula Ben Anderson, *op. cit.* hlm. 219-440; Abu Hanifah, “Revolusi Memakan Anaknya Sendiri: Tragedi Amir Sjarifudin”, *Prisma* no. 8, 1977, hlm. 86-100; Alfian, “Tan Malaka: Pejuang Revolusioner yang Kesepian”, *Prisma* no. 8, 1977, hlm. 57-77; Mangunwijaya, “Dilema Sutan Syahrir: Antara Pemikir dan Politikus”, *Prisma* no.8, 1977, hlm. 24-42; Jacques Leclerc, “Kondisi Kehidupan Partai: Kaum Revolusioner Indonesia dalam Mencari Identitas 1928-1948”, *Prisma*, no.8 1979, hlm 62-81.

¹² Taufik Abdullah dan A.B. Lopian (eds.), *op. cit.*, hlm. 318-369; lihat pula Muhammad Hatta, *Kemerdekaan dan Demokrasi, Buku 2*, (Jakarta: LP3ES, 2000); Muhammad Hatta, *Keadilan Sosial dan Kemakmuran, Buku 4*, (Jakarta: LP3ES, 2000); Muhammad Hatta, *Sumber Daya Ekonomi dan Kebutuhan Pokok Masyarakat, Buku 5*, (Jakarta: LP3ES, 2000); Muhammad Hatta, *Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat*, (Jakarta: LP3ES, 2000).

mana-mana, dan kondisi ekonominya berada pada posisi yang paling buruk daripada waktu lain dalam sejarahnya.¹³

Perekonomian Indonesia yang kacau diperlihatkan dengan perkebunan dan pabrik-pabrik yang tidak terurus dan porak poranda pada masa sebelumnya, yaitu selama kekuasaan Jepang.¹⁴ Pada masa itu, sumber bahan makanan pokok masyarakat menipis dikarenakan banyak yang harus diserahkan kepada bala tentara Jepang.¹⁵ Pada masa awal revolusi, Inflasi sangat tinggi karena beredarnya tiga mata uang yang mempunyai nilai yang berbeda-beda.¹⁶ Sementara itu, Kas negara kosong dan

¹³ Justus M. Van der Kroef, "Indonesia: Independent and The Cold War", *International Journal*, vol. 7 no. 4, 1952, hlm. 283.

¹⁴ Taufik Abdullah dan A.B. Lopian, (eds.), *op. cit.*, hlm. 47; terpuruknya produksi gula akibat dari terbengkalainya pabrik-pabrik gula dikemukakan oleh Alec Gordon, "Colonial Mode of Production and Indonesian Revolution", *Economic and Political Weekly*, vol. 21 no. 32, 1986, hlm. 1423-1424.

¹⁵ Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa (1942-1945)*, (Jakarta: Gramedia, 1993).

¹⁶ Inflasi yang tinggi disebabkan oleh adanya dualisme kekuasaan antara pemerintah RI dengan NICA Belanda yang masing-masing mempunyai sistem ekonomi dan perbankan sendiri, yaitu antara *De Javasche Bank* dengan Bank Negara Indonesia (BNI). Lihat Noek Hartono, "Bank Indonesia Sejarah Lahir dan Pertumbuhannya", stensilan t.t. tp. Pada awalnya pemerintah Indonesia mengeluarkan penetapan tiga mata uang yang berlaku, yaitu: uang Pendudukan Jepang, uang sisa dari Pemerintah Hindia Belanda dan uang cadangan *de Javasche Bank* yang disita NICA. Lihat *Makloemat Presiden RI* no. 1/10, 3 Oktober 1945. Hingga akhir tahun 1945, mata uang yang beredar sebanyak 3,9 milyar dengan perincian uang pendudukan Jepang sebanyak 1,6 milyar, sisa pemerintah Hindia Belanda sebanyak 300 juta, dan mata uang *de Javasche Bank* sebesar 2 milyar. Lihat *Makmoer*, no. 2 th. I, 10 Januari 1946. Sejak tanggal 6 Maret 1946, peredaran uang berubah dengan dikeluarkannya uang NICA atas perintah Panglima AFNEI Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford. Uang NICA disebut juga dengan "uang merah" yang telah dipersiapkan dan dicetak sejak Desember 1942. Lihat Report of The President of The Java Bank, 1946-1947, <http://pekerjamuseum.blogspot.co.id/2007/08/kondisi-ekonomi-indonesia-1945-1950.html>, diunduh 18 Juli 2024. Sebagai reaksi atas keputusan ini, pemerintah RI mengeluarkan mata uang sendiri yang disebut ORI (Oeang Repoeblik Indonesia) pada bulan Oktober 1946 untuk menggantikan peredaran uang Jepang. Lihat "Tentang Pengeloearan Oeang Repoeblik Indonesia: Oendang2

pemerintah kesulitan mengisi dan mendapatkan dana karena blokade ekonomi¹⁷ yang dilakukan Belanda sejak November 1945.¹⁸ Semua sektor masyarakat menderita pada tingkat tertentu akibat kenaikan harga, sehingga kemerdekaan tidak bisa segera menghasilkan kemakmuran yang diharapkan oleh banyak orang.¹⁹

Ekonomi dan keuangan merupakan faktor yang penting dalam menjaga dan menjalankan pemerintahan republik yang baru saja dibentuk. Mestika Zed mengemukakan bahwa dalam menjalankan revolusi, Pemerintah Republik Indonesia yang baru berdiri memerlukan pembiayaan atau pendanaan, diantaranya

no. 17 Tahun 1946”, *Kedaulatan Rakjat*, 2 Oktober 1946. Peredaran banyak jenis uang ini memicu inflasi yang tinggi, sehingga menyebabkan kenaikan harga makanan pokok yang pada Oktober 1947 lebih mahal 200 persen dari harga sebelumnya. Harga barang-barang non makanan lebih tinggi lagi, yaitu 300-500 persen dari harga sebelumnya atau harga semestinya. Lihat Oey Beng To, *Sejarah Kebijakan Moneter, jilid I (1945-1958)*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 1991), hlm. 21.

¹⁷ Soemitro Djojohadikoesoemo menjelaskan bahwa akibat dari blokade Belanda, produk-produk perkebunan Indonesia senilai 200 juta tidak bisa diekspor. Perekonomian Indonesia hanya bergantung pada ekonomi petani yang pada tahun 1946 diperkirakan mengalami surplus beras sebesar 200 ribu sampai 400 ribu ton. Lihat Soemitro Djojohadikoesoemo, *Beberapa Soal Keoeangan* (Jakarta: np: 1947), hlm. 27; lihat pula *Makmoer*, no. 9 th. I, 25 April 1946.

¹⁸ Pada periode ini, keberadaan Belanda merupakan bagian dari Sekutu. Oleh karena itu, kebijakan yang muncul harus atas perintah atau persetujuan dari Sekutu. Pasukan Sekutu di Indonesia menghadapi permasalahan kurangnya personil, kurangnya persiapan, tanggung jawab yang besar, dan informasi intelejen yang terbatas. Hal ini diperparah dengan informasi “palsu” dari Belanda bahwa pemerintah Indonesia merupakan bentukan dari Jepang. Hal inilah yang menyebabkan Sekutu “membatasi” aktivitas pemerintah Indonesia dalam persenjataan, perdagangan, dan aktivitas strategis lainnya. Lihat L. de Jong, *Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereld Oorlog*, (s’Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1986), hlm. 558. Terlebih lagi ada pertemuan rahasia antara Inggris dan Belanda pada tanggal 24 Agustus 1945 yang memperlihatkan keberpihakan sekutu terhadap Belanda daripada Indonesia yang baru merdeka. Lihat Taufik Abdullah dan A.B. Lopian (eds.), *op. cit.*, hlm. 199.

¹⁹ M.C. Ricklefs, *op. cit.*, hlm 475.

untuk penyediaan alat perlengkapan militer, menjalankan roda pemerintahan, dan membiayai kegiatan diplomatik.²⁰ Robert Cribb menambahkan bahwa revolusi Indonesia adalah urusan yang mahal dan membutuhkan dana yang banyak. Tidak hanya menghadapi kehancuran harta benda, Republik yang masih muda ini juga menghadapi kesulitan ekonomi dan finansial akibat ketidakmampuan mengambil semua sumber pendapatan dan kesulitan membangun struktur perpajakan alternatif.²¹ Dengan demikian, mendapatkan dana dalam dinamika revolusi merupakan hal yang sangat penting dan mendasar, sebagaimana yang dikatakan oleh Nazaruddin Zainun bahwa, dalam revolusi Indonesia dibutuhkan pendanaan yang memadai agar dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan logistik angkatan perang dan memenuhi kebutuhan rakyatnya.²²

Begitu pentingnya pendanaan untuk eksistensi Republik Indonesia sudah sejak awal disadari oleh para pemimpin Republik. Mohammad Hatta, salah satu proklamator kemerdekaan sekaligus kreator *roadmap* perekonomian Indonesia, dalam pidatonya di depan peserta Kongres Fonds Kemerdekaan Indonesia tahun 1946

²⁰ Mestika Zed, "Ekonomi Indonesia Pada Masa Revolusi: Mencari Dana Perjuangan (1945-1950)" dalam Taufik Abdullah (ketua), *Denyut Nadi Revolusi Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 243.

²¹ Robert Cribb, "Opium and the Indonesian Revolution", *Modern Asian Studies*, vol.22 No. 4, 1988, hlm. 701.

²² Nazaruddin Zainun, *Logistik Tentara Nasional Indonesia dalam Perang Gerilya di Jawa Tengah, 1947-1949*, (Pulau Pinang: University Sains Malaysia, 2019), hlm. 30-35.

menjelaskan bahwa salah satu hal yang bisa menyelamatkan bangsa Indonesia dari sulitnya masa revolusi adalah terwujudnya pendanaan yang memadai.²³ Hatta mengidentifikasikan dana yang dibutuhkan bagi revolusi Indonesia dapat berupa uang, barang, bahan makanan, pakaian, perhiasan, maupun segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk membiayai suatu “urusan”.²⁴ Pengumpulan dana adalah usaha yang dilakukan oleh berbagai kelompok dari unsur Republik yang dipergunakan sebagai modal perjuangan. Dana tersebut dipergunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, membiaya perjuangan melawan Belanda yang ingin menjajah kembali, dan memenuhi kehidupan rakyat.

Keberhasilan mendapatkan dana tidak hanya ditentukan seberapa banyak dana didapatkan tetapi juga seberapa banyak pemerintah daerah dan masyarakat terlibat di dalamnya.²⁵ Menteri Agama kabinet Syahrir, H.M. Rasjidi mengemukakan bahwa

²³ “Malam Perpisahan Konggres Fonds Kemerdekaan”, *Kedaulatan Rakjat*, 11 Maret 1946.

²⁴ Selain uang, pemerintah melalui Fonds Kemerdekaan Indonesia dan fonds-fonds lainnya menerima beberapa barang berupa emas, intan, dan berlian. Agar bisa dimobilisasikan dan dikendalikan, batu-batu mulia tersebut dilarang dikirimkan ke luar daerah. Lihat “Larangan Pengiriman Emas”, *Kedaulatan Rakjat*, 5 Agustus 1946. Pemerintah juga mengumpulkan padi dan bahan makanan pokok lainnya, lihat “Resolusi Panitia Pengempoean Padi”, *Kedaulatan Rakjat*, 6 Februari 1946. Pemerintah RI juga mendaftar dan mengumpulkan barang-barang penting yang sangat berguna bagi kehidupan rakyat Indonesia, lihat “Pendjelasan Pendaftaran Barang2 Penting”, *Kedaulatan Rakjat*, 18 Oktober 1946. Hatta selaku ketua Fonds Kemerdekaan Indonesia Pusat menyampaikan bahwa panitia Fonds menerima berbagai macam barang yang dapat dipergunakan untuk membiayai perjuangan bangsa Indonesia, lihat “Malam Perpisahan Konggres Fonds Kemerdekaan”, *Kedaulatan Rakjat*, 11 Maret 1946.

²⁵ “Malam Perpisahan Konggres Fonds Kemerdekaan”, *Kedaulatan Rakjat*, 11 Maret 1946.

kesadaran rakyat dalam memberikan sumbangan merupakan wujud kecintaannya kepada negara.²⁶ Agar upaya mencari dan mengumpulkan dana tersebut dapat berhasil, pemerintah harus memobilisasi rakyatnya untuk patuh dan bersedia melaksanakan kebijakan-kebijakan negara. Mobilisasi dapat diartikan upaya untuk membujuk,²⁷ mempengaruhi,²⁸ mengontrol,²⁹ mengumpulkan,³⁰ dan mengerahkan³¹ sumber daya suatu negara. Mobilisasi yang dilakukan oleh negara atau pemerintah tidak akan pernah berhasil tanpa adanya partisipasi dari rakyat atau kelompok

²⁶ “f 2.000.000 Dalam Beberapa Djum: Hasil Pertemuan dengan para Hartawan dan bangsawan”, *Kedaulatan Rakjat*, 8 Juni 1946.

²⁷ Bart Klademans, “Mobilization and Participation: Social-Psychological Expansions of Resources Mobilization Theory”, *American Sociological Review*, vol. 49 no. 5, 1984, hlm. 589.

²⁸ Quinn Meham, *Institutional Origins of Islamist Political Mobilization*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), hlm. 38; lihat pula Marcus Marcu Mietzner, Burhanuddin Muhtadi, and Rizka Halid, “Entrepreneurs of Grievance: Drivers and Effects of Indonesia’s Islamist Mobilization”, *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, vol. 174 no. 2/3, 2018, hlm. 183.

²⁹ Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa (1942-1945)*, (Jakarta: Gramedia, 1993); lihat pula J. Craig Jenkins, “Resource Mobilization Theory and the Study of Social Movements”, *Annual Review of Sociology*, vol. 9, 1983, hlm. 532-533.

³⁰ Om Prakash, Funding Pattern In The Naxal Movement In Contemporary India”, *Proceedings of the Indian History Congress*, 2015, Vol. 76 (2015), hlm. 900-901; lihat pula Padam Nepal, “Money And Movement Dynamics: A Study Of 'Fund' As A Realm Of Contestation In Ecoprotest Campaigns With Special Reference To The Narmada Bachao Andolan In India”, *The Indian Journal of Political Science*, vol. 69 no. 4, 2008, hlm 833-842; lihat pula Sothy Khieng, “Funding Mobilization Strategies of Nongovernmental Organizations in Cambodia”, *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, vol. 25 no. 6, 2014, hlm. 1441-1464.

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia no. 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, hlm. 4.

di bawahnya.³² Besar kecilnya partisipasi rakyat atau masyarakat sangat ditentukan efektif tidaknya mobilisasi yang dilakukan.

Sepanjang masa revolusi, terdapat berbagai cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keuangan dalam perjuangan melawan usaha Belanda membangun kembali kekuasaan kolonialnya di Kepulauan Indonesia. Kajian Mestika Zed memperlihatkan bahwa Pemerintah Indonesia selama masa revolusi berusaha untuk mendapatkan pemasukan uang melalui perdagangan dengan dibantu oleh para pialang di Palembang.³³ Studi Robert Cribb dan Julianto Ibrahim juga menunjukkan cara-cara Pemerintah Indonesia mendapatkan dana pada masa revolusi dengan memperdagangkan candu atau opium.³⁴ Yong Mun Cheong yang mengkaji koneksi Indonesia-Singapura pada masa revolusi menjelaskan juga tentang upaya-upaya pemerintah Indonesia mencari sumber-sumber keuangan dengan cara penyelundupan.³⁵

³² Agustinus Kehi Mau dan Emei Dwinanarhati, "Upaya Pemerintah Memobilisasi Partisipasi pembangunan Melalui pendekatan Organisasi (Studi di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu)", *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 8 no. 1, 2019, hlm. 85-86; lihat pula Bert Klandermans, *op. cit.*, hlm. 585-586; Marc L. Hutchison, "Territorial Threat, Mobilization, and Political Participation in Africa", *Conflict Management and Peace Science*, vol. 28 no. 3, Special Issue: The Politics of Territorial Threat and Rivalry, July 2011, hlm. 185-187; Dorien Zandbergen and Rivke Jaffe, "Source Participation: Citizenship, Democracy and Responsibilization", *Etnofoor*, vol. 26 no. 2, 2014, hlm. 7-8.

³³ Pialang adalah broker atau makelar yang terdiri dari para politisi, para pedagang yang sudah berpengalaman, dan kelompok militer yang terkait satu sama lain. Lihat Mestika Zed, *loc. cit.*

³⁴ Robert Cribb, *op. cit.*, hlm. 701-722; lihat pula Julianto Ibrahim, *Perdagangan dan Penggunaan Candu di Surakarta Pada Masa revolusi, 1945-1950*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

³⁵ Yong Mun Cheong, *The Indonesia Revolution and the Singapore Connection, 1945-1949*, (Leiden: KITLV Press, 2003).

Jawa Tengah merupakan wilayah yang penting dalam revolusi Indonesia, karena menjadi pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi Republik Indonesia. Sejak awal revolusi, sebagian besar wilayah di Jawa Tengah menunjukkan dukungannya terhadap Proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya Republik Indonesia. Setelah Agresi Militer Belanda I tanggal 21 Juli 1947, wilayah Jawa Tengah benar-benar terbagi menjadi dua kekuasaan yang terbatas oleh garis Demarkasi.³⁶ Terbelahnya wilayah Jawa ini menyebabkan kesulitan dalam penyediaan logistik bagi tentara,³⁷ distribusi bahan makanan terutama beras,³⁸ penggunaan dan penentuan nilai mata uang,³⁹ serta koordinasi produksi hasil-hasil perkebunan terutama gula.⁴⁰ Semua kesulitan itu, menambah beban negara untuk mendapatkan dan mengumpulkan dana untuk perjuangan. Beras

³⁶ Garis demarkasi merupakan batas antara wilayah Republik dengan daerah pendudukan Belanda. Daerah pendudukan Belanda merupakan bekas wilayah yang dikuasai Sekutu dan “diberikan” kepada Belanda pada pertengahan bulan Juli 1946. Perjanjian gencatan senjata tanggal 14 Oktober 1946 yang mengawali perundingan Linggarjati secara tidak langsung “mengesahkan” posisi Belanda dalam garis demarkasi tersebut. Lihat “Indonesiër beraanden grootscheepe aanvallen: Nederlandshe troepen grepen, Meer licht op schendingen van bestand regeering wijst beschuldigingen af”, *Het Dagblad*, 16 Januari 1947; lihat pula Justus M. van der Kroef, “Dutch Policy and the Linggarjati Agreement, 1946-1947”, *The Historian*, vol. 15 no. 2, 1953, hlm. 172-173.

³⁷ Nazaruddin Zainun, *op. cit.*, hlm. 2-3

³⁸ Pierre van der Eng, “Food for Growth: Trends in Indonesia's Food Suhlmlly, 1880-1995”, *The Journal of Interdisciplinary History*, vol. 30 no. 4, 2000, hlm. 597.

³⁹ Robert Cribb, “Political Dimensions of the Currency Question 1945-1947”, *Indonesia*, no. 31, 1981, hlm. 113-136.

⁴⁰ Alec Gordon, “Colonial Mode of Production and Indonesian Revolution”, *Economic and Political Weekly*, vol. 21 no. 32, Aug. 9, 1986, hlm. 1423-1424.

dan gula yang merupakan andalan komoditas di Jawa terutama Jawa Tengah, telah porak poranda akibat pendudukan Jepang, sehingga kurang berkontribusi dalam “menyediakan” dana untuk perjuangan. Setelah agresi militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948 yang membuat kota-kota di Jawa Tengah dikuasai Belanda, upaya untuk mengumpulkan dana semakin sulit untuk dilakukan.

1.2 PERMASALAHAN DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN

1.2.1 Permasalahan

Permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah struktur dan sistem mobilisasi serta partisipasi baik negara maupun masyarakat dalam mengumpulkan dukungan finansial dan kebutuhan lainnya untuk membiayai perjuangan di Jawa Tengah pada masa revolusi. Mobilisasi selalu diikuti oleh partisipasi, sebagaimana keping mata uang yang membutuhkan kedua sisi untuk eksistensinya. Hanya saja, partisipasi yang mengikuti mobilisasi bisa muncul karena kesadaran, rasa cinta, rasa memiliki, atau bisa juga karena keterpaksaan dan ketakutan. Pada masa Jepang, mobilisasi dilakukan dengan kontrol yang ketat, sehingga partisipasi yang muncul berupa keterpaksaan, ketakutan, dan penderitaan.⁴¹ Apakah cara dan kondisi yang terjadi pada masa Jepang tersebut terjadi juga pada masa revolusi? Ataukah memiliki cara dan kondisi yang berbeda?

⁴¹ Aiko Kurasawa, *loc. cit.*

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada empat hal utama untuk menjawab pokok permasalahan di atas, yaitu Di Tengah himpitan ekonomi dan fragmentasi wilayah Jawa Tengah, bagaimanakah negara dan agensi lokal merajut struktur mobilisasi dana perjuangan yang mampu mengubah potensi sosial menjadi partisipasi yang nyata, serta tantangan apa saja yang memicu kontraksi dalam proses tersebut? Sejauh manakah modal sosial, ekonomi, dan politik Jawa Tengah mampu dikonversi menjadi mesin pembiayaan revolusi yang efektif? Siapakah aktor-aktor kunci (negara maupun non negara) yang menggerakkan rantai mobilisasi ini, dan apa rasionalitas dibalik keterlibatannya ini? Bagaimana strategi dan bentuk pengumpulan dana tersebut berevolusi sejak awal Proklamasi hingga periode akhir revolusi?

1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian

1.2.2.1 Cakupan Temporal

Cakupan temporal atau periode penelitian ini adalah masa revolusi, yang dimulai setelah Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan diakhiri pada penandatanganan pengakuan kedaulatan di Konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 Desember 1949.⁴² Dalam konteks pengumpulan dana, periode revolusi dibagi menjadi 3 periode waktu, yaitu: pertama, Periode Proklamasi 17 Agustus 1945 hingga Agresi Militer Belanda I tanggal 21 Juli 1947. Periode

⁴² Manuel Kasiepo, *op. cit.*, hlm.72.

ini ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1) Kondisi politik, ekonomi, dan keamanan yang tidak stabil; 2) Walaupun berada pada kondisi yang “lemah”, seluruh proses pengumpulan dana dilakukan oleh negara; 3) Bentuk-bentuk pengumpulan dana oleh negara dilakukan secara darurat dan hanya melanjutkan proses pengumpulan dana yang telah dilakukan di periode sebelumnya.

Kedua, periode Agresi Militer Belanda I tanggal 21 Juli 1947 sampai Agresi Militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948. Periode ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) Kondisi politik, ekonomi, dan keamanan yang relatif stabil; 2) Proses pengumpulan dana sebagian besar dilakukan oleh masyarakat sipil bersenjata atau laskar-laskar rakyat; 3) Dalam mengumpulkan dana, laskar-laskar rakyat saling berkompetisi, sehingga memunculkan kreativitas dan tidak jarang pula bentrokan yang diwarnai dengan aksi-aksi kekerasan.

Ketiga, Periode Agresi Militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948 hingga penandatanganan Konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 Desember 1949. Periode ini memiliki beberapa ciri, yaitu: 1) Seluruh kota-kota besar di Jawa Tengah dikuasai oleh Belanda; 2) Proses pengumpulan dana banyak dilakukan oleh masyarakat sipil yang membantu para pejuang dalam melakukan gerilya. 3) Bentuk-bentuk pengumpulan dana berhubungan dengan perang gerilya, sebagai strategi Indonesia menghadapi Belanda.

1.2.2.2 Cakupan Spasial

Wilayah yang menjadi cakupan spacial dalam penelitian ini adalah Jawa Tengah. Pada masa revolusi, secara administratif sulit mengidentifikasi dan menentukan wilayah-wilayah yang menjadi bagian dari Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan, pada masa kolonial wilayah Jawa Tengah hanya meliputi Semarang, Pekalongan, Banyumas, Kedu, Jepara, dan Rembang berdasarkan *Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indie* tahun 1936⁴³ Sementara itu, Surakarta dan Yogyakarta pada masa kolonial menjadi wilayah *vorstenlanden* yang mempunyai hak otonomi untuk memerintah wilayahnya sendiri. Berdasarkan UU desentralisasi *Bestuurhervorming Wet* tahun 1922, swapraja Surakarta diundangkan dalam *Staatsblad* no. 560 tahun 1927 dengan wilayah meliputi Surakarta, Kabupaten Sragen, Klaten, Boyolali, Wonogiri, dan Kota Mangkunegoro. Swapraja Yogyakarta diundangkan dalam *Staatsblad* no. 561 tahun 1927 dengan wilayah meliputi Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan kota Pakualaman.⁴⁴ Pada masa pendudukan Jepang, Surakarta dan Yogyakarta menjadi daerah istimewa dengan sebutan *kochi*.⁴⁵

⁴³ *Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indie*, 1936

⁴⁴ Mona Lohanda. "Sistem pemerintahan Hindia Belanda", dalam Taufik Abdullah dan A.B. Lopian, (eds.), *Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 5: Masa Pergerakan kebangsaan*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2012), hlm. 53-54.

⁴⁵ Nugroho Notokusanto, (ed.), *Sejarah Nasional Indonesia VI: Jaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975), hlm 5

Pada masa revolusi, Swapraja Surakarta dan Yogyakarta tidak termasuk dalam 8 Provinsi yang dibentuk dalam sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945⁴⁶, tetapi sejak tanggal 6 September 1945, kedua swapraja itu mendapat status otonom dari pemerintah.⁴⁷ Akibat dari gejolak revolusi sosial di Surakarta, status otonomi Surakarta menjadi hilang dan secara administratif menjadi bagian dari Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Presiden no. 16/SD/1946 tanggal 15 Juli 1946.⁴⁸

Sementara itu, Yogyakarta memiliki nasib yang lebih beruntung dengan terhindar dari gelombang revolusi sosial dan

⁴⁶ Provinsi yang terbentuk itu adalah: Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Lihat Pramudya Ananta Tour, dkk., *Kronik Revolusi Indonesia: Jilid I (1945)*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999), hlm. 34-35.

⁴⁷ Status otonom dari pemerintah diberikan setelah Surakarta dan Yogyakarta mengirimkan pernyataan atau amanat untuk bergabung kepada pemerintah Republik Indonesia. Surakarta mengeluarkan pernyataan berada di bawah pemerintah RI pada tanggal 1 September 1945 dan Yogyakarta mengeluarkan amanat bergabung kepada pemerintah RI pada tanggal 5 September 1945. Sehari kemudian yaitu tanggal 6 September 1945, pemerintah mengeluarkan piagam penetapan tertanggal 19 Agustus 1945 dan ditandatangani oleh Presiden Sukarno dan dibawa oleh Menteri Negara A.A. Maramis dan Mr. Sartono. Lihat Imam Samroni, dkk., *Daerah Istimewa Surakarta: Wacana Pembentukan Daerah Istimewa Surakarta Ditinjau dari Perspektif Historis, Sosiologis, Filosofis, dan Yuridis*, (Yogyakarta: Pura Pustaka, 2010), hlm. 295-296; lihat pula Atmakusuma, (ed.), *Tahta Untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*, (Jakarta: Gramedia, 1973), hlm.

⁴⁸ Peraturan Presiden no. 16/SD/1946 tanggal 15 Juli 1946 berbunyi: "Daerah Kasunanan dan Mangkunegaran untuk sementara waktu dipandang merupakan karesidenan sebelum susunan pemerintahannya ditetapkan Undang-Undang". Lihat Panitia Penjusun Kerabat Mangkunegaran, *Mangkunegaran Selajang Pandang*, (Surakarta: Perpustakaan Rekso Pustoko Mangkunegara, nt.), hlm. 1-13; lihat pula Djawatan penerangan Surakarta, *Kenang-Kenangan Kota Besar Surakarta, 1945-1953*, (Surakarta: Djawatan Penerangan, 1953), hlm. 1-3; lihat juga Julianto Ibrahim, *Kraton Surakarta dan Gerakan Anti Swapraja*, (Yogyakarta: Malioboro Press, 2008), hlm. 99-100.

menunjukkan keberpihakan yang sangat kuat terhadap Republik. Kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono IX yang kharismatik sejak awal revolusi berusaha memposisikan “diri”nya di belakang Republik sambil mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan untuk mempertahankan keistimewaan Yogyakarta. Pada tanggal 30 Oktober 1945, Sultan mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa BPKNIP sebagai lembaga legislatif yang berarti bahwa Sultan HB IX dan PA VIII sebagai lembaga eksekutif.⁴⁹ Maklumat itu diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Maklumat no. 18 tahun 1946 tanggal 13 Mei 1946 yang menegaskan bahwa lembaga legislatif di Yogyakarta dipegang oleh DPRD dan lembaga eksekutifnya dipegang oleh Sultan HB IX dan PA VIII.⁵⁰

Secara administratif, Yogyakarta memiliki raja sebagai lembaga eksekutif dan DPRD Yogyakarta sebagai lembaga legislatif. Akan tetapi, selama masa revolusi, Sultan Hamengku Buwono IX tidak dikukuhkan atau memposisikan “dirinya” sebagai gubernur. Sultan HB IX selalu menyebut sebagai penguasa Yogyakarta dalam setiap amanat dan maklumat yang dikeluarkan. Selain itu, secara

⁴⁹ “Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan SP Paku Alam VIII, Kepala Daerah Istimewa Negara RI, tanggal 24 Dulkaidah Ehe 1876/30 Oktober 1945, tentang Pemberitahuan bahwa Badan Pekerja Komite Nasional Daerah Jogjakarta merupakan Badan Legislatif (Badan Pembuat UU) sebagai Wakil Rakyat Daerah Jogjakarta”, *Senerai Arsip Puro Pakualam no. T7.II.1.3. 1932*.

⁵⁰ “Maklumat No : 18 dari Negeri Kasultanan Jogjakarta dan Pradja Pakualaman, Daerah Istimewa Negara RI, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII, tentang Dewan Dewan Perwakilan Rakyat di DIJ (Kasultanan dan Pakualaman)”, *Senerai Arsip Puro Pakualam no. T7.II.1.4.1947*.

administrasi Yogyakarta baru dikukuhkan sebagai Daerah Istimewa berdasarkan UU no. 3 tahun 1950.⁵¹ Dari kerumitan administrasi tersebut, maka alasan yang tepat untuk menjadikan Yogyakarta sebagai bagian dari Jawa Tengah pada masa revolusi adalah alasan geografis. Posisi Yogyakarta yang berada di tengah pulau Jawa dan berdekatan dengan wilayah Jawa Tengah merupakan alasan yang tepat untuk hal ini.

Jawa Tengah memang menjadi bahasan utama dalam penelitian ini. Akan tetapi, Jawa Tengah hanya diposisikan sebagai panggung yang “mementaskan” permasalahan di tingkat nasional. Sebagaimana yang dikaji oleh Anthony Reid dalam Revolusi Nasional Indonesia, bahwa perkembangan politik nasional masa revolusi menentukan “wujud” revolusi di tiap-tiap daerah di Republik.⁵² Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Kuntowijoyo bahwa “wajah” revolusi nasional dapat dilihat pada perkembangan revolusi di tingkat lokal.⁵³

Syahrir mengatakan bahwa revolusi Indonesia berkembang dalam 2 bagian, yaitu dari luar merupakan revolusi nasional dan

⁵¹ Anom Wahyu Asmorojati, “Dinamika Pengaturan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Tinjauan Negara Kesatuan”. *Prosiding Kenferensi Nasional Kewarganegaraan III*, 11 November 2017, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, hlm 437.

⁵² Anthony Reid, *Revolusi Nasional Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 135-178.

⁵³ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah, Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Tiara Wacana dan Jurusan Sejarah UGM, 2003), hlm. 152-153.

dari dalam merupakan revolusi masyarakat yang berkembang menurut hukum masyarakat demokratis yang memiliki tabiat sendiri. Memahami revolusi nasional tanpa mengetahui revolusi masyarakat sangat berbahaya, demikian juga sebaliknya.⁵⁴

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Setidaknya ada 4 aspek penting yang hendak dibahas dalam penelitian disertasi ini, yaitu:

1. Menyingkap dan menyajikan fakta yang sebenarnya tentang dana revolusi yang selama ini dihebohkan oleh sebagian kalangan di Indonesia. Selama ini, pemahaman sebagian rakyat Indonesia tentang keberadaan dana revolusi yang dikumpulkan Soekarno dengan angka mencapai trilyunan dollar begitu kuat. Bahkan seorang menteri agama sampai harus menggali makam di situs Batu Tulis hanya ingin membuktikan dan mendapatkan dana tersebut. Penelitian ini diharapkan bisa membantu memberikan pengertian bahwa dana revolusi yang dimaksud bukan dana yang dikumpulkan Soekarno yang mencapai angka fantastis tersebut, tetapi merupakan dana yang dengan susah payah dikumpulkan untuk mendukung perjuangan Indonesia pada masa revolusi

⁵⁴ Soetan Syahrir, *Perjuangan Kita*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Guntur 49, 2010), hlm. 19; buku ini merupakan terjemahan dari Soetan Sjahrir, *Our Struggle*, translated by Benedict R. O'G Anderson, (Ithaca: Cornell University, 1968), hlm. 28.

yang angkanya tidak sebanyak itu dan bahkan sudah habis untuk keperluan perjuangan.

2. Menjelaskan dan menganalisa secara teoritis dan faktual kondisi dan jalannya revolusi kemerdekaan di Jawa Tengah, khususnya terkait eksistensi negara Republik Indonesia yang bisa bertahan, berjalan, dan mampu menghidupi “dirinya” sendiri secara ekonomi
3. Menjelaskan dan mengungkapkan upaya-upaya pemerintah Republik dalam memobilisasi dalam pencarian dan pengumpulan dana dan mengungkapkan bentuk-bentuk partisipasi rakyat di Jawa Tengah dalam mengumpulkan dana untuk perjuangan.
4. menguraikan dan menjelaskan tentang pengelolaan dan strategi sebuah negara yang baru merdeka ketika berhadapan dengan berbagai keterbatasan sumber daya terutama keuangan dan tantangan eksternal dan internal.

1.4 TINJAUAN PUSTAKA

Revolusi Indonesia merupakan proses yang tidak bisa dilepaskan dengan tatanan dunia yang terjadi setelah Perang Dunia II. Tanpa menafikkan perjuangan bangsa Indonesia sejak pergerakan nasional, setelah Perang Dunia II bangsa-bangsa di Asia dan Afrika termasuk Indonesia mengalami proses dekolonisasi. Paradigma dekolonisasi ini menurut Bambang Purwanto

mengakibatkan sebagian besar pemahaman tentang sejarah Indonesia cenderung anakronis. Mereka menafikan banyak realitas sebagai bagian dari kultur kolonial dan menganggap hal itu hanya sebagai bagian dari sejarah Belanda atau sejarah penjajah yang tidak ada hubungannya dengan sejarah Indonesia. Dekolonisasi juga membangun wacana sekaligus perspektif yang menjadikan historiografi sekedar sebagai alat penghujat dan menggunakan masa lalu sebagai tameng pembenaran.⁵⁵ Pemujaan yang berlebihan terhadap “nasionalisasi”, “Indonesianisasi”, atau “pribumisasi” tidak hanya gagal mengkategorisasi sejarah sebelum kolonialisme, tetapi juga hanya membalikkan begitu saja stigma pemberontak masa kolonial menjadi pahlawan pada masa kemerdekaan.⁵⁶

Untuk meminimalisasikan kecenderungan anakronisme, maka historiografi pada masa revolusi Indonesia perlu dipahami dengan tepat dan dikelompokkan berdasarkan tema-tema kajiannya. Studi revolusi Indonesia yang membahas mengenai revolusi nasional secara komprehensif dapat dilihat pada karya

⁵⁵ Bambang Purwanto, *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?* (Yogyakarta: Ombak, 2006), hlm. Xii.

⁵⁶ Slamet Subekti, “Tinjauan Kritis terhadap kecenderungan Historiografi Indonesia Masa Kini”, *Humanika*, vol. 15 no. 9, 2012. Hlm. 5.

Kahin,⁵⁷ Ben Anderson,⁵⁸ dan Anthony Reid.⁵⁹ Kahin berpendapat bahwa revolusi Indonesia lahir karena akumulasi ketidakpuasan yang dialami sebagian besar rakyat Indonesia pada masa kekuasaan kolonial Belanda. Pemerintah kolonial menempati struktur sosial paling atas dan rakyat pribumi hanya menempati strata terbawah dengan kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Kesejahteraan ekonomi mengikuti aliran kekuasaan kompeni, dimana semakin banyak seseorang mendapat aliran kekuasaan dari kompeni, maka semakin besar peluangnya untuk mendapatkan uang. Sangat sedikit orang yang mendapat eceran kekuasaan dari pemerintah kolonial, yang berarti semakin banyak orang yang menderita dan berada dalam kemiskinan. Menurut Kahin, inilah kesalahan kolonial yang mengakibatkan munculnya gerakan-gerakan kebangsaan yang menuntut Indonesia merdeka. Buku ini menggambarkan nasionalisme dan revolusi Indonesia dengan sangat runtut dan komprehensif. Sehingga tidak aneh jika Sartono Kartodirdjo menganggap buku ini sebagai karya klasik yang tidak hanya unggul sebagai karya ilmiah mengenai gerakan nasional Indonesia yang terperinci, komprehensif dan objektif, tetapi juga merupakan kesaksian hidup dari sejarah revolusi Indonesia.⁶⁰

⁵⁷ George Mc. Turnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia: Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).

⁵⁸ Ben Anderson, *loc. cit.*

⁵⁹ Anthony Reid, *loc. cit.*

⁶⁰ Secara pribadi Kahin juga dikagumi dan dipuji oleh sejarawan-sejarawan lainnya seperti Stanley J. O'Connor, Thak Chaloemtiarana and

Revolusi Indonesia juga menghasilkan revolusi sosial yang radikal dan revolusioner sebagaimana kajian-kajian yang telah dilakukan Anthony Reid di Sumatera Timur,⁶¹ Anton Lucas⁶² dan Abdurrachman Suryomihardjo⁶³ di Brebes, Tegal, dan Pemalang, serta Suyatno dan Julianto di Surakarta.⁶⁴ Skenario revolusi sosial, sejak awal diperlihatkan dalam kondisi masyarakat yang mengalami krisis politik. Krisis politik yang membawa perasaan tidak aman dan kegelisahan timbul karena kontrol penguasa militer Jepang mengundurkan diri bersamaan dengan datangnya ancaman kembalinya kekuasaan kolonial Belanda. Di sekitar kelompok-kelompok kekuasaan yang terutama terdiri dari kesatuan-kesatuan bersenjata atau badan-badan perjuangan muncul sentra-sentra kekuasaan, di samping formasi kekuasaan

Benedict R. O'G. Anderson. Menurut mereka, Kahin adalah sosok yang jujur, punya integritas dan moral yang tinggi. Lihat Stanley J. O'Connor, Thak Chaloemtiarana and Benedict R. O'G. Anderson, "George McTurnan Kahin, 1918-2000", *Indonesia*, no. 69, 2000, hlm. 5-6.

⁶¹ Anthony Reid, "The Birth of the Republic in Sumatra", *Indonesia*, no. 12, 1971, hlm. 21-46; lihat pula Anthony Reid, *Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987).

⁶² Anton Lucas, "Social Revolution in Pemalang, Central Java, 1945", *Indonesia*, no. 24, 1977, hlm. 86-122; lihat pula Anton Lucas, *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989).

⁶³ Abdurrachman Surjomihardjo, "Peristiwa Tiga Daerah, Suatu Interpretasi Sejarah: Revolusi Sosial Menyambut Proklamasi Kemerdekaan", *Prisma*, No. 8, 1981.

⁶⁴ Suyatno Kartodirdjo, "Feodalisme dan Revolusi Sosial di Surakarta 1945-1950" *Historia*, vol. 2, no. 2, 2007; lihat pula Julianto Ibrahim, *Bandit dan pejuang di Simpang Bengawan: Kriminalitas dan kekerasan Masa revolusi di Surakarta*, (Surakarta: Bina Cipta Pustaka, 2004); lihat pula Julianto Ibrahim, *Kraton Surakarta dan gerakan Anti Swapraja*, Yogyakarta: Malioboro Press, 2008.

pemerintah pusat beserta aparaturnya di daerah-daerah. Dalam situasi krisis yang berkepanjangan itu badan-badan tersebut berfungsi tidak hanya untuk melakukan perlawanan tetapi juga sebagai pusat identitas kelompok serta wahana untuk menjamin kelangsungan hidupnya (*survival*). Pada satu pihak tujuan mempertahankan kemerdekaan mempersatukan kesatuan-kesatuan perjuangan, pada pihak lain kepentingan politik masing-masing acap kali memisahkan dan menimbulkan pertentangan, sehingga situasi krisis menjadi lebih hebat dan berubah menjadi situasi konflik. Pendeknya, konflik timbul sebagai perwujudan dari perebutan kekuasaan yang timbul dari dasar ideologi yang saling bertentangan.⁶⁵ Dalam situasi konflik seperti itu, maka prasarana kekerasan memegang peranan penting. Dalam hal ini, yang menarik di sini adalah konversi ideologi ke pandangan serta sikap revolusioner.⁶⁶ Gerakan ideologi revolusioner menawarkan nilai-nilai baru dalam orde sosial politik lama. Hal ini menyebabkan terjadinya *clash* di beberapa daerah antara organisasi revolusioner dengan unsur-unsur orde lama atau golongan berkedudukan (*establishment*).⁶⁷

⁶⁵ Sartono Kartodirdjo (1981), *op. cit.*, hlm. 3-4.

⁶⁶ Muhammad Hatta, *Kumpulan Karangan IV* (Jakarta: Balai Buku Indonesia, 1954), hlm. 245; Lihat pula Muhammad Hatta, *Indonesia Menggugat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977).

⁶⁷ Sartono Kartodirdjo (1981), *op. cit.*, hlm. 6.

Dengan kondisi konflik dan kekerasan dan revolusi sosial, maka kondisi ekonomi Indonesia tidak dapat berkembang, bahkan berada pada kebangkrutan. Kerjasama perdagangan dengan Inggris⁶⁸ dan Amerika⁶⁹ nyaris terhenti dan tidak memberikan keuntungan yang berarti bagi republik. Menurut Huff dan Majima perekonomian negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia setelah PD II mengalami 3 tantangan, yaitu: 1) hiperinflasi; 2) perebutan kekuasaan; dan 3) mengendalikan uang yang dicetak pada saat perang.⁷⁰ Menurut Stephen Mihm pada negara-negara yang baru merdeka terutama setelah PD II ada kecenderungan untuk mencetak uang sebanyak mungkin untuk memenuhi kebutuhan, sehingga terjebak pada inflasi yang tinggi.⁷¹ Sementara itu menurut Knutsen, revolusi telah menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun, hingga menimbulkan krisis.⁷²

⁶⁸ Nicholas J. White, "Surviving Sukarno: British Business in Post-Colonial Indonesia, 1950-1967", *Modern Asian Studies*, vol. 46 no. 5, 2012, hlm. 1277-1315.

⁶⁹ Gerlof D. Homan, "American Business Interests in the Indonesian Republic, 1946-1949", *Indonesia*, no. 35, 1983, hlm. 125-132.

⁷⁰ Gregg Huff and Shinobu Majima, "The Challenge of Finance in South East Asia during the Second World War", *War in History*, vol. 22 no. 2, 2015, hlm. 191.

⁷¹ Stephen Mihm, "Follow the Money", *Journal of the Early Republic*, vol. 36 no. 4, 2016, hlm. 783-785.

⁷² Carl Henrik Knutsen, "Income Growth and Revolutions", *Social Science Quarterly*, vol. 95 no. 4, 2014, hlm. 920.

Kondisi perekonomian Indonesia yang porak poranda menyebabkan negara berupaya untuk mencari dan mengumpulkan dana untuk perjuangan selama masa revolusi. Tidak banyak tulisan atau kajian yang membahas mengenai proses pencarian dan pengumpulan dana selama masa revolusi. Setidaknya ada 3 sejarawan yang sudah mengkaji tentang tema ini, yaitu Robert Cribb tentang perdagangan dan penyelundupan opium oleh para pejuang,⁷³ Mestika Zed tentang perdagangan dan kepialangan di Palembang,⁷⁴ serta Yong Mun Cheong tentang koneksi dengan Singapura berupa penyelundupan-penyelundupan komoditi perdagangan.⁷⁵ Ketiga karya ini lebih menitikberatkan pada upaya-upaya negara yaitu Republik Indonesia dalam mencari dana, sedangkan keterlibatan masyarakat dalam proses pencarian dana tidak banyak dibahas.

Penelitian yang tidak boleh ditinggalkan dalam membahas faktor ekonomi dan pendanaan masa revolusi adalah karya Nazaruddin Zainun dengan judul “Logistik Tentara Nasional Indonesia dalam Perang Gerilya di Jawa Tengah, 1947-1949”. Karya Zainun ini memfokuskan kajiannya pada upaya TNI mendapatkan dan mengelola logistik selama perang. Logistik yang dikelola

⁷³ Robert Cribb (1988), *loc. cit.*

⁷⁴ Mestika Zed, *loc. cit.*

⁷⁵ Yong Mun Cheong, *The Indonesia Revolution and the Singapore Connection, 1945-1950*, (Leiden: KITLV Press, 2003).

terbatas pada persenjataan dan perbekalan. Scope spacial tidak secara komprehensif membahas mengenai Jawa Tengah, tetapi lebih memfokuskan pada Jawa Tengah bagian barat yang sebagian besar sudah dikuasai Belanda.⁷⁶

Dalam revolusi Indonesia, faktor penting dalam proses pencarian dana adalah mobilisasi negara dan partisipasi masyarakat. Kajian-kajian mengenai mobilisasi dapat dilihat pada karya-karya Aiko Kurasawa tentang mobilisasi dan kontrol masa pendudukan Jepang,⁷⁷ Mecham tentang mobilisasi umat Islam,⁷⁸ Holcombe tentang struktur dasar mobilisasi massa,⁷⁹ dan Jenkins yang membahas mengenai mobilisasi dan gerakan sosial.⁸⁰ Keempat karya ini sepakat bahwa mobilisasi dilakukan dari atas yaitu penguasa, pemimpin, atau negara untuk menyelaraskan kebijakan-kebijakan negara dengan kepentingan rakyatnya dengan tujuan agar rakyat patuh dan memenuhi keinginan para penguasa atau negara. Mobilisasi oleh negara selalu diikuti dengan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat atau rakyat. Kajian-kajian tentang partisipasi yang relevan dengan disertasi ini adalah artikel dari

⁷⁶ Nazarudin Zainun, *loc. cit.*

⁷⁷ Aiko Kurasawa, *loc. cit.*

⁷⁸ Quinn Mecham, *loc. cit.*

⁷⁹ Alec Holcombe, "The Basic Structure of the Mass Mobilization" in *Mass Mobilization in the Democratic Republic of Vietnam, 1945-1960*, (Hawai: University of Hawai Press, 2020), hlm. 139-158.

⁸⁰ J. Craig Jenkins, *loc. cit.*

Hutchison tentang partisipasi politik masyarakat di Afrika,⁸¹ Klandemans tentang mobilisasi dan partisipasi dengan pendekatan teori mobilisasi sumberdaya,⁸² dan Zandbergen dan Jeffe yang membahas mengenai partisipasi sebagai tanggung jawab warga negara.⁸³ Karya-karya ini melihat bahwa partisipasi merupakan bentuk aktivitas dari masyarakat atau dari kelompok bawah untuk ikut serta dalam proses atau aktivitas tertentu yang dilakukan oleh penguasa, karena melihat adanya peluang. Partisipasi masyarakat semakin tinggi saat eksistensi lembaga tempat mereka hidup atau institusi negara terancam oleh kekuatan dari luar.

Kajian-kajian tentang dana maupun uang dapat dilihat pada karya-karya Om Prakash tentang pengumpulan dana pada gerakan Naxal di India,⁸⁴ Padam Nepal yang membahas mengenai dana yang dapat digunakan sebagai ajang kontestasi,⁸⁵ dan Tom Cliff tentang pengumpulan dana oleh masyarakat pedesaan di Tiongkok.⁸⁶ Ketiga karya ini melihat bahwa ketersediaan dana merupakan faktor yang penting untuk memastikan suatu gerakan atau aktivitas itu dapat “berjalan”. Sementara itu, karya-karya tentang uang yang

⁸¹ Marc L. Hutchison, *loc. cit.*

⁸² Bert Klandermans, *loc.cit.*

⁸³ Dorien Zandbergen and Rivke Jaffe, *loc. cit.*

⁸⁴ Om Prakash, *loc. cit*

⁸⁵ Padam Nepa, *loc. cit.*

⁸⁶ Tom Cliff, *loc. cit.*

berhubungan dengan revolusi Indonesia dapat dilihat pada artikel Robert Cribb tentang politik uang pada masa revolusi kemerdekaan di Indonesia,⁸⁷ Wolters tentang komparasi dekolonisasi bank sentral di Phillipina dan Indonesia,⁸⁸ Noek Hartono tentang sejarah bank Indonesia,⁸⁹ dan Oe Beng To yang membahas sejarah moneter di Indonesia.⁹⁰ Karya-karya ini sepakat bahwa kondisi moneter dan keuangan Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan mengalami kekacauan yang parah akibat beredarnya 3 mata uang, yaitu ORI, uang NICA, dan uang Jepang.

Beberapa tulisan yang sudah membahas tentang pengumpulan dana pada masa revolusi yang dilakukan oleh negara Indonesia adalah karya Ihza Arvianita Hardina tentang Fonds Kemerdekaan Indonesia, Ria Andamari tentang undian uang, dan Julianto Ibrahim tentang perdagangan opium. Karya Ihza Hardiana lebih difokuskan pada permasalahan-permasalahan internal yang terjadi saat perubahan dari Fonds Kemerdekaan Indonesia (FKI) menjadi Fonds Nasional Indonesia (FNI).⁹¹ Perbedaan mendasar dengan karya disertasi ini terletak pada upaya FKI dan FNI

⁸⁷ Robert Cribb (1981), *loc. cit.*

⁸⁸ W.G. Wolters, *loc. cit.*

⁸⁹ Noek Hartono, *loc. cit.*

⁹⁰ Oei beng To, *loc. cit.*

⁹¹ Ihza Arvianita Hardina, "Dari Fonds Kemerdekaan Indonesia ke Fonds Nasional Indonesia, 1945-1948", *Skripsi S1*, Departemen Sejarah FIB UGM, 2022.

mengumpulkan dana dan hubungannya dengan proses mobilisasi oleh negara dan partisipasi masyarakat.

Karya Ria Andamari lebih difokuskan pada upaya negara mencari alternatif pendanaan melalui Undian Uang Negara dan kepentingan negara meratakan peredaran ORI.⁹² Sementara itu, disertasi ini menempatkan Undian Uang Negara sebagai bagian dari proses mobilisasi pengumpulan dana oleh negara dan berupaya mengungkap dinamika partisipasi dari masyarakat. Karya Julianto Ibrahim tentang candu lebih difokuskan pada perdagangan candu oleh badan-badan perjuangan di dalam negeri, yaitu Surakarta.⁹³ Sementara itu, dalam disertasi ini perdagangan candu lebih difokuskan pada upaya penyelundupan ke luar negeri terutama ke Singapura.

1.5 KERANGKA KONSEPTUAL

Perdebatan soal dekolonisasi selalu mewarnai pembahasan mengenai lahirnya negara-negara baru di kawasan Asia dan Afrika pasca Perang Dunia II. Ilmuwan-ilmuwan sosial seperti Franz

⁹² Ria Andamari, "Mencari Alternatif Sumber Penerimaan Negara: Undian Uang Negara Pemerintah Republik Indonesia, 1947-1948", *Skripsi S1*, Departemen Sejarah FIB UGM, 2021.

⁹³ Julianto Ibrahim, *Perdagangan dan Penggunaan Candu di Surakarta Pada Masa revolusi, 1945-1950*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

Fanon,⁹⁴ Phillip C. Jessup,⁹⁵ Eric Hobsbawm,⁹⁶ dan Walter Mignalo⁹⁷ melihat dekolonisasi sebagai proses yang tidak terhindarkan setelah Eropa mengalami kemunduran Pasca Perang Dunia II. Sejarawan-sejarawan Eropa seperti David van Reybrouk⁹⁸ dan Gert Oostindie⁹⁹ juga mempercayai bahwa revolusi kemerdekaan Indonesia merupakan bagian dari proses dekolonisasi global.

⁹⁴ Menurut Frantz Fanon dekolonisasi adalah proses radikal untuk membebaskan diri dari dominasi politik, ekonomi, dan psikologis melalui kekerasan tandingan sebagai respon dari kekerasan kolonial serta menciptakan nilai-nilai baru dan pembangunan yang khas bagi bangsa baru pasca kolonial. Lihat Frantz Fanon, *The Wretched of The Earth*, translated by Constance Farrington, (New York: Groove Press, 1963), hlm. 83-86.

⁹⁵ Menurut Philip C. Jessup, setelah Perang Dunia II dekolonisasi merupakan proses yang tidak terhindarkan. Dekolonisasi muncul saat kekuatan kolonialisme melemah dan menguatnya peran organisasi internasional seperti PBB dalam menegakan hukum internasional. Lihat Philip C. Jessup, *The Birth of Nation: Sejarah Kelahiran Negara-Negara Pasca Perang Dunia II*, (Yogyakarta: Center For Information Analysis, 2006).

⁹⁶ Eric Hobsbawm melihat bahwa dekolonisasi merupakan proses yang penting dan signifikan dalam mengubah wajah dunia setelah Perang Dunia II dan selama Perang Dingin. Lihat Eric J. Hobsbawm, *Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914-1991*, (London: Avacus, 1995).

⁹⁷ Menurut Walter Mignolo, dekolonialitas atau dekolonialisasi adalah proyek epistemologi yang ingin membebaskan diri dari logika dominasi modernitas-kolonialitas barat, menentang dominasi eurosentrisme, dan mendorong terciptanya pluriversalitas yang lahir dari kaum terpinggirkan. Lihat Walter D Mignolo & Catherine E. Walsh, *On Decoloniality: Concepts, Analytics, Praxis*, (London: Duke University Press, 2018).

⁹⁸ Menurut David van Reybrouk revolusi Indonesia mempunyai kontribusi yang besar dalam gerakan dekolonisasi di seluruh dunia. Lihat David van Reybrouk, *Revolusi: Indonesia and the Birth of the Modern World*, (New York: W.W. Norton & Company, 2024).

⁹⁹ Gert Oostindie berpendapat bahwa revolusi Indonesia merupakan perang dekolonisasi dan perang sipil yang kacau. Lihat Gert Oostindie, *Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950: Kesaksian Perang Pada Sisi Sejarah yang Salah*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2016), hlm. xv-xvii

Menurut Bambang Purwanto, menggeneralisasikan periode revolusi Indonesia sebagai proses dekolonisasi tidak sepenuhnya benar. Bambang Purwanto meyakini bahwa dekolonisasi mengandung makna keterlibatan kekuatan kolonial dalam proses kemerdekaan suatu bangsa. Oleh karena itu, dalam periodisasi baru seputar kemerdekaan Indonesia, Bambang Purwanto menempatkan proses dekolonisasi muncul bersamaan dengan penjajahan Jepang. Periode berikutnya adalah kemerdekaan Indonesia dan rekolonisasi Belanda, serta dilanjutkan dekolonialisasi dan perjuangan mempertahankan Kemerdekaan. Melihat periodisasi di atas, perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan pada masa revolusi, oleh Bambang Purwanto disebut sebagai dekolonialisasi bukan dekolonisasi.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Bambang Purwanto, "Kata Pengantar 1: Merdeka dalam Kenyataan dan Historiografi Indonesia" dalam Harry Poeze dan Henk Schulte Nordholt, *Merdeka: Perang Kemerdekaan dan Kebangkitan Republik Indonesia yang Tak Pasti (1945-1950)*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2023), hlm. xvii. Lihat pula Bambang Purwanto, "Proklamasi Kemerdekaan, Revolusi, dan Perang di Indonesia, 1945-1949: Sebuah Pengantar", dalam Remy Limpach, *Kekerasan Ekstrem Belanda di Indonesia: Perang Kemerdekaan Indonesia 1945-1949*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2019), hlm. xi-xxii.

Menurut Anthony Reid,¹⁰¹ Sartono Kartodirdjo,¹⁰² dan Ong Hok Ham,¹⁰³ revolusi Indonesia merupakan masa penuh kekerasan, tidak hanya perang dengan Belanda, tetapi juga muncul kekuatan rakyat “bawah” menyingkirkan struktur lama dan menegaskan tatanan sosial baru. Menurut Gert Oostindie, kekerasan pada masa revolusi Indonesia dilakukan oleh kedua belah pihak yang berperang, yaitu Belanda dan Indonesia. Bahkan Remy Limpach berpendapat bahwa kekerasan yang dilakukan Belanda sangat ekstrim, bersifat struktural dan sistematis.¹⁰⁴ Gert Oostindie menambahkan bahwa, Belanda terlibat dalam perang yang “salah”, perang yang tidak dimenangkan (pada akhirnya).¹⁰⁵

Roel Frakking dan Abdul Wahid dalam buku “Dunia Revolusi” yang merupakan kerjasama peneliti-peneliti Belanda dengan UGM

¹⁰¹ Menurut Anthony Reid, revolusi Indonesia merupakan peristiwa sosial yang radikal dengan melibatkan partisipasi total seluruh rakyat, tidak hanya perang melawan Belanda, tetapi juga sebagai kekuatan revolusioner utama menyingkirkan struktur lama dan menegaskan tatanan sosial baru. Lihat: Anthony Reid, *op. cit.*, hlm. 296-298.

¹⁰² Sartono Kartodirdjo mengatakan bahwa revolusi Indonesia merupakan proses politik modern yang kompleks dan penuh kekerasan yang ditandai dengan konflik antar golongan, pemberontakan massa terhadap tatanan yang lama untuk menciptakan negara modern. Selain itu, revolusi Indonesia juga merupakan perjuangan bangsa Indonesia melawan Belanda. Lihat Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hlm. 3-7

¹⁰³ Ong Hok Ham berpendapat bahwa revolusi Indonesia merupakan revolusi yang kacau, digerakkan dari bawah, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Lihat: Onghokham, *Rakyat dan Negara*, (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan dan PT Grafitas, 1983), hlm. 146-165.

¹⁰⁴ Remy Limpach, *Kekerasan Ekstrem Belanda di Indonesia: Perang Kemerdekaan Indonesia 1945-1949*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2019).

¹⁰⁵ Gert Oostindie, *loc. cit.*

menggambarkan bahwa revolusi Indonesia sangat pelik, multikompleks, dan berlapis. Terdapat kelompok-kelompok pemberontak, pejuang, politisi Republik dan Belanda yang terlibat aktif dalam konflik. Periode revolusi Indonesia merupakan masa multifaset yang dibatasi dan dibentuk oleh aktor-aktor yang mewakili entitas politik, agama, sosial, dan regional yang berbeda. Mereka semua menampakkan perbedaan-perbedaan itu dengan tembakan dan pedang, kadang-kadang lewat perundingan, bahkan seringkali sejajar dengan konflik besar Indonesia-Belanda.¹⁰⁶

Di sisi lain, masa revolusi Indonesia juga diwarnai oleh upaya-upaya negara mempertahankan eksistensinya, tidak hanya bertahan dari rekolonisasi Belanda, tetapi juga memastikan pemerintah Indonesia masih tetap bisa berjalan. Tonggak penting dalam revolusi Indonesia adalah Proklamasi 17 Agustus 1945. Sebagaimana yang dikatakan Hatta, Indonesia sudah merdeka, tetapi belum berdaulat, karena harus menghadapi rekolonisasi Belanda, “tuan lama” yang ingin berkuasa kembali.¹⁰⁷ Menurut Bambang Purwanto, upaya Indonesia membangun negara yang merdeka telah hancur lebur dengan keputusan Belanda yang ingin berkuasa kembali. Tanpa menafikkan konflik internal, kendala yang

¹⁰⁶ Lihat Roel Frakking and Abdul Wahid, “Revolutionary World: An Introduction” in Bambang Purwanto, Roel Frakking, Abdul Wahid, Gerry van Klinken, Martijn Eickhoff, Yulianti, Ireen Hoogenboom (eds.), *op. cit.*, hlm. 14.

¹⁰⁷ Mohammad Hatta, “Kedaulatan Rakyat”, dalam Emil Salim (Ketua Redaksi), *Karya Lengkap Bung Hatta, Buku 2: Kemerdekaan dan Demokrasi*, (Jakarta: LP3ES, 2000), hlm. 89-106.

dihadapi Indonesia ini telah menciptakan struktur dan kultur darurat sepanjang periode 1945-1950.¹⁰⁸

Dalam kondisi yang serba darurat, harus dipahami bahwa negara Indonesia masa revolusi belum menjadi negara yang “utuh”. Dalam teori *state of emergency* (kondisi darurat), ketika negara sedang menghadapi ancaman atau berada pada krisis yang membahayakan, maka fungsi pemerintahan normal tidak dapat berjalan efektif. Menurut Richard A. Posner, dalam kondisi yang darurat, hukum dan konstitusi sebagai instrumen yang fleksibel dan adaptif, bukan aturan kaku yang berlaku sama dalam segala situasi. Kelangsungan hidup negara dan warga negaranya adalah prioritas utama yang dapat membenarkan langkah-langkah luar biasa yang tidak dapat diterima pada masa normal.¹⁰⁹ Oleh karena itu, Menurut Carl Schmitt, negara yang berada pada kondisi darurat dapat menanggukkan atau mengesampingkan hukum dan mengontrol kehidupan warga negaranya.¹¹⁰ Selanjutnya Giorgio Ambaneni berpendapat bahwa, dalam negara yang darurat, keputusan untuk mengesampingkan hukum sangat diperlukan, karena kontrol negara menjadi tidak merata yang berkontribusi

¹⁰⁸ Bambang Purwanto, *op. cit.*, hlm. xvii-xviii.

¹⁰⁹ Richard A. Posner, *Not a Suicide Pact: The Constitution in a Time of National Emergency*, (Oxford: Oxford University Press, 2006).

¹¹⁰ Carl Schmitt, *Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty*, (Chicago: The University of Chicago Press, 2005), 5-15.

pada munculnya kelompok-kelompok yang sulit dikendalikan.¹¹¹

Kajian Cribb tentang gangster di Jakarta memperlihatkan bahwa munculnya gangster-gangster di Jakarta pada masa revolusi disebabkan oleh lemahnya kontrol negara.¹¹²

Menurut Theda Skocpol, agar negara dapat berfungsi di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu, maka negara harus menggunakan “berbagai macam cara” dalam mendinamisasikan kehidupan masyarakat serta memiliki kekuatan untuk memaksa dan memonopoli kekerasan.¹¹³ Menurut Tuong Vu, untuk negara yang baru merdeka seperti Indonesia, memonopoli kekerasan harus dilakukan agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya Tuong Vu mengatakan bahwa, agar eksistensinya dapat bertahan, negara yang baru merdeka harus mencari legitimasi, membangun kedaulatan, teritorialisasi, dan menciptakan birokrasi terpusat.¹¹⁴

Dalam Proses pembentukan negara Indonesia, menurut Mestika Zed¹¹⁵ demikian juga Robert Cribb¹¹⁶, tersedianya dana

¹¹¹ Giorgio Ambaneni, *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life*, (California: Stanford University Press, 1998), hlm. 15-29

¹¹² Robert Cribb, *op. cit.*, hlm. 121-135.

¹¹³ Theda Skocpol, *States and Social Revolution: A Comparative Analysis of France, Russia, and China*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2015). Hlm. 1-7.

¹¹⁴ Tuong Vu, “The Revolutionary Path to State Formation in Vietnam”, *Journal of Vietnamese Studies*, vol. 11 no. 3 dan 4, 2016, hlm. 272-288.

¹¹⁵ Mestika Zed, *loc. cit.*

¹¹⁶ Robert Cribb (1983), *loc. cit.*

merupakan faktor yang penting dan mendasar. Menurut Hatta, dana dalam revolusi Indonesia adalah uang atau segala sesuatu yang dapat membiayai berbagai macam “urusan”. Dengan uang suatu negara dapat memenuhi kebutuhannya dan membantu mewujudkan apa yang diinginkannya. Oleh karena itu, Hatta mengatakan bahwa dalam proses penyelenggaraan negara, kepentingan ekonomi dan politik harus berjalan bersama. Politik harus berusaha menuntut hak rakyat, untuk meluaskan medan pergerakannya dan untuk memperoleh kemerdekaan rakyat, sedangkan ekonomi harus memperbaiki dan menyelamatkan penghidupan rakyat, yakni melepaskan rakyat dari kongkongan ekonomi asing atau penindasan majikan. Menurut Hatta, politik tanpa ekonomi tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan, sedangkan ekonomi tanpa haluan politik akan kehilangan arah dan tujuannya.¹¹⁷

¹¹⁷ Muhammad Hatta, *Daulat Rakyat dan Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta: UST Pres, 2015). Berkaitan dengan hubungan politik dan ekonomi dapat dilihat dari karya-karya James A. Caporaso and David P. Levine, serta Bruno Frey. Caporaso dan Levine mengemukakan bahwa paradigma yang mengaitkan antara kajian politik seperti penyelenggaraan politik, baik yang menyangkut proses, aspek dan kelembagaan dengan kajian ekonomi seperti kegiatan ekonomi baik oleh masyarakat maupun diintrodusir oleh pemerintah adalah pendekatan ekonomi politik. Lihat James A. Caporaso and David P. Levine, *Theory of Political Economy*, (New York: Cambridge, 1994), hlm. 1-10. Sementara itu, Bruno Frey mengatakan bahwa paradigma ekonomi politik merupakan saling kebergantungan antara ekonomi dan politik. Ekonomi dan politik berinteraksi dengan banyak cara dalam rangka alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilisasi. Dicuplik dari Muslim Mufti, *Ekonomi Politik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 3.

Menurut Flores-Macias dan Kreps, negara yang sedang berperang atau mengalami revolusi harus mengumpulkan pajak perang dari rakyatnya agar biaya perang atau revolusi dapat diatasi. Pengumpulan pajak perang itu bisa dengan paksaan atau sukarela untuk mewujudkan kemenangan yang dicita-citakan bersama.¹¹⁸ Menurut Masquita¹¹⁹ dan Goldsmith¹²⁰, pengumpulan pajak perang itu harus mampu melibatkan rakyat dan tidak boleh mengurangi dukungan rakyat terhadap negara.

Dalam mengumpulkan pajak atau dana untuk kepentingan negara, pemerintah Indonesia harus melakukan mobilisasi dan sekaligus meminta rakyatnya untuk ikut berpartisipasi dalam proses pengumpulan dana tersebut. Menurut Bart Klademan,¹²¹ Quin Mecham,¹²² dan Marcus Mietzner,¹²³ mobilisasi adalah upaya

¹¹⁸ Gustavo A. Flores-Macias and Sarah E. Kreps, "Borrowing Suhlmort for War: The Effect of War Finance on Public Attitudes toward Conflict", *The Journal of Conflict Resolution*, vol. 61 no. 5, 2017, hlm. 910-911.

¹¹⁹ Bueno de Mesquita, Bruce, James Morrow, Randolph Siverson, and Alastair Smith, "Testing Novel Implications from the Selectorate Theory of War", *World Politics*, vol. 56 no. 3, 2014, hlm. 363-388.

¹²⁰ Benjamin Goldsmith, "Defense Effort and Institutional and Victory: Why Try Harder?" *Security Studies*, Vol. 16, No.2, 2007, hlm. 189-222.

¹²¹ Menurut Bart Klademan mobilisasi adalah upaya untuk membujuk masyarakat untuk mendukung suatu gerakan dengan cara material maupun nonmaterial. Lihat Bart Klademans, *op. cit.*, hlm. 589.

¹²² Quinn Mecham mengatakan bahwa mobilisasi adalah upaya negara untuk mempengaruhi massa melalui kebijakannya. Lihat Quinn Mecham, *op. cit.*, hlm. 38.

¹²³ Menurut Marcus Mietzner, Burhanuddin Muhtadi and Rizka Halida mobilisasi adalah upaya negara menyelaraskan kebijakan-kebijakannya dengan kepentingan dan keinginan massa. Lihat Marcus Mietzner, Burhanuddin Muhtadi and Rizka Halida, *op. cit.*, hlm. 183.

negara membujuk atau mempengaruhi massa agar mendukung atau menyelaraskan kebijakan-kebijakan negara dengan kepentingan dan keinginan massa. Sementara itu, kajian Aiko Kurasawa¹²⁴ dan Craig Jenkins¹²⁵ melihat mobilisasi dilakukan negara atau kelompok-kelompok masyarakat dengan memaksa atau melakukan kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan. Kajian-kajian dari Om Prakash,¹²⁶ Padam Nepal,¹²⁷ dan Sothie Kieng¹²⁸ yang menghubungkan mobilisasi dengan pendanaan, mendefinisikan mobilisasi sebagai upaya untuk mengumpulkan uang atau dana.

Menurut teori mobilisasi sumber daya yang dikembangkan oleh Charles Tilly,¹²⁹ John D. McCarthy dan Mayer N. Zald,¹³⁰ keberhasilan suatu gerakan sangat ditentukan dengan kemampuan untuk mendapatkan akses ke sumber daya dan kemampuan untuk menggunakannya. Sumber daya yang dimaksud dalam teori ini

¹²⁴ Aiko Kurasawa, *loc. cit.*

¹²⁵ Craig Jenkins berpendapat bahwa mobilisasi adalah proses dimana kelompok orang mengamankan kontrol kolektif atas sumber daya yang dibutuhkan untuk tindakan kolektif. Lihat J. Crag Jenkins, *op. cit.*, hlm. 532-533.

¹²⁶ Om Prakash, *op. cit.*, hlm. 900-901.

¹²⁷ Padam Nepal, *op. cit.*, hlm. 833-842.

¹²⁸ Sothy Khieng, *op. cit.*, hlm. 1441-1442.

¹²⁹ Charles Tilly, *From Mobilization to Revolution*, (New York: Random House, 1978).

¹³⁰ John D. Mc. Carthy and Mayer N Zald, "Resource Mobilization and social MovemenA partial Theory", *American Journal of Sociology*, vol. 82, no. 6, 1977, hlm. 1212-1241.

adalah finansial seperti dana atau donasi, manusia yang berupa aktor-aktor yang terlibat dalam mobilisasi, media seperti surat kabar, organisasi beserta jaringannya, dan framing atau propaganda. Dalam teori ini juga dijelaskan bahwa finansial atau dana merupakan bagian yang paling penting dalam strategi suatu gerakan sosial mencapai tujuannya.¹³¹

Menurut Charles Tilly, mobilisasi yang dilakukan pada masa revolusi atau serba darurat harus memperhatikan aspek struktur, sumber daya, dan peluang politik. Charles Tilly memperkenalkan konsep repertoar, yaitu strategi mobilisasi dengan cara kolektif dan berulang, serta pengalokasian seluruh sumber daya nasional.¹³²

Tujuan utama dari mobilisasi adalah terciptanya partisipasi dari masyarakat atau kelompok sosial yang diinginkan.¹³³ Menurut Bert Klandermans, partisipasi adalah kesediaan seseorang atau

¹³¹ Beberapa tulisan pendukung untuk memahami teori mobilisasi sumber daya. Bob Edwards, "Resource Mobilization Theory", dalam George Ritzer (ed.), *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*, (Malden: Blackwell Publishing, 2007), hlm. 3901-3906; lihat pula Daniel M. Cress and David A. Snow, "Mobilization at the Margins: Resources, Benefactors, and the Viability of Homeless Social Movement Organizations", *American Sociological Review*, vol. 61, no. 6, 1996, hlm. 1089-1109.

¹³² Charles Tilly, "Social Movement and National Politics" dalam C. Bright and Sandra Harding (Eds), *State-Making and Social Movements: Essays in History and Theory*, Ann-Arbor, (Michigan: University of Michigan Press, 2009), hlm. 306. Lihat pula Charles Tilly (1978), *loc. cit.*

¹³³ Lihat Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1994), hlm. 2-8; lihat pula John M. Cohen and Norman Thomas Uphoff, *Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design*, (Cornell: Cornell University Press, 1977).

sekelompok orang terlibat dalam kegiatan tertentu.¹³⁴ Sementara itu, menurut Zandbergen dan Jaffe, partisipasi merupakan keterlibatan warga negara dalam politik dan pemerintahan serta bentuk tanggung jawab warganegara terhadap negaranya.¹³⁵ Arbi Sanit menambahkan bahwa partisipasi warga negara bertujuan untuk memberi dukungan kepada negara dan pemerintah.¹³⁶

Keterkaitan partisipasi dengan mobilisasi dapat dilihat dari karya-karya Tom Cliff,¹³⁷ Muhammad Yunus,¹³⁸ dan Tessa Morris-Suzuki.¹³⁹ Menurut mereka, masyarakat dapat melakukan

¹³⁴ Bert Klandermans, "Mobilization and Participation: Social-Psychological Expansions of Resource Mobilization Theory", *American Sociological Review*, Vol. 49, 1984, No. 5, hlm. 585-586.

¹³⁵ Dorien Zandbergen and Rivke Jaffe, "Source Participation: Citizenship, Democracy and Responsibilization", *Etnofoor*, Vol. 26, No. 2, 2014, hlm. 7-8.

¹³⁶ Arbi Sanit, *Swadaya Politik Masyarakat: Telaah Tentang Keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partisipasi Politik, Pertumbuhan Hukum dan Hak Asasi*, (Jakarta: Rajawali, 1985).

¹³⁷ Tom Cliff menulis kasus di desa Huagang Tiongkok yang memperlihatkan bahwa masyarakat mewujudkan kesejahteraan mereka sendiri dengan bantuan masyarakat kaya di desanya seperti kredit bergilir dan bank bawah tanah yang memberikan skema kesejahteraan bagi penduduk pedesaan. Masyarakat kaya yang memberikan "amal" dengan membentuk kredit mikro mempunyai motivasi agar dipuji dan dihormati, sehingga sering disimbolkan dengan "wajah". Oleh karena itu, dana yang membentuk kredit bergilir dan bank bawah tanah itu sering disebut sebagai "dana wajah". Lihat Tom Cliff, *loc. cit.*

¹³⁸ Muhammad Yunus yang mengkaji masalah Grameen Bank di Bangladesh mengatakan bahwa kemiskinan telah mendorong masyarakat lebih kreatif dan mampu bertahan hidup dengan berbagai macam cara. Lihat Muhammad Yunus, "Grameen Bank, Microcredit and Millennium Development Goals", *Economic and Political Weekly*, vol. 39 no. 36, 2004, hlm. 47-65; lihat pula Muhammad Yunus, "Poverty Alleviation: Is Economics Any Help? Lessons from the Grameen Bank Experience", *Journal of International Affairs*, vol. 52, no. 1, The Multiple Faces of World Poverty: Conceptions, Manifestations and Responses, 1998, hlm. 47-65.

¹³⁹ Tessa Morris-Suzuki menyebut dana kesejahteraan yang berbasis pada masyarakat sebagai "politik kehidupan informal". Morris-Suzuki menulis bahwa politik kehidupan informal adalah situasi di mana kelompok-kelompok masyarakat mencoba membentuk masa kini dan masa depan kehidupan mereka sendiri tanpa bantuan negara. Masyarakat itu menjadikan kondisi mereka

partisipasi sekaligus mobilisasi dalam mewujudkan kesejahteraannya sendiri tanpa campur tangan dari negara. Bahkan Cohen & Uphoff mengatakan bahwa mobilisasi merupakan salah satu jenis dari partisipasi.¹⁴⁰ Hal ini berarti bahwa sulit dipisahkan antara mobilisasi dengan partisipasi. Mobilisasi dan partisipasi bagaikan masing-masing sisi dalam satu keping mata uang.

Walaupun mobilisasi dengan partisipasi memiliki hubungan yang erat, tapi sebenarnya terdapat beberapa perbedaan mendasar dari kedua konsep tersebut. Menurut Huntington dan Nelson, partisipasi berasal dari kesadaran, inisiatif, dan keinginan sukarela dari masyarakat. Partisipasi cenderung bersifat organik, berkelanjutan, dan didasarkan pada dialog, serta aspirasi internal masyarakat. Tujuan partisipasi adalah menyalurkan aspirasi dari masyarakat ke dalam sistem politik. Sementara itu, Mobilisasi diarahkan untuk diorganisir oleh pihak luar. Mobilisasi seringkali bersifat terencana dan terstruktur, serta memiliki tujuan mendapatkan sesuatu dari upaya mobilisasi yang dilakukan.¹⁴¹

sebagai sebuah kekuatan dan ancaman dari luar atau ketidakcukupan tindakan dari negara memicu tindakan yang lebih agresif. Lihat Tessa Morris-Suzuki, "Invisible Politics," *Humanities Australia*, vol. 1, no. 5, 2014, hlm 53-64.

¹⁴⁰ John M. Cohen and Norman Thomas Uphoff, *loc. cit.*

¹⁴¹ Lihat Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, *op. cit.*, hlm. 10-15; lihat pula Afan Gaffar, "Menampung Partisipasi Politik Rakyat", *Jurnal Sosial Politik*, vol. 1, no. 7, 1997, hlm. 8-10.

Pendapat Hutington dan Nelson selanjutnya mengatakan bahwa secara struktur dan sistem mobilisasi berasal dari atas, terlembagakan, dan terencana, sedangkan partisipasi berasal dari bawah, spontan, dan sukarela.¹⁴² Untuk lebih memahami mengenai struktur dan sistem berkaitan dengan solidaritas sosial antar individu, antar masyarakat, serta hubungan individu dan masyarakat dengan negara dapat meminjam pemikiran-pemikiran dari Emile Durkheim. Emile Durkheim membedakan solidaritas sosial menjadi dua, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik mengacu pada masyarakat tradisional yang memiliki kesamaan dalam nilai, norma, dan tugas mereka, sedangkan solidaritas organik mengacu pada masyarakat modern yang kompleks dengan masing-masing individu yang memiliki peran yang berbeda, saling tergantung, dan memiliki tujuan yang sama.¹⁴³

Solidaritas sosial yang muncul di masyarakat sangat ditentukan atau dipengaruhi oleh struktur dan sistem sosial yang ada. Solidaritas mekanik cenderung memiliki struktur yang sederhana. Kesadaran historis dan kolektif yang muncul terbentuk

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ Steven Lukes, *Emile Durkheim his Life and Work, Historical and Critical Study*, (Harper and Row Publisher, 1972); lihat pula Andi Erlangga Rahmat, dkk., "Perspektif Emile Durkheim Tentang Pembagian Kerja dan Solidaritas Masyarakat Maju", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, vol. 7 no. 3, 2023, hlm. 38-44; Dina Sri Mulyani dan Silfia Hanani, "Dinamika Solidaritas Mekanis dan Solidaritas Organik dalam Manajemen Pendidikan: Perspektif Durkheimian", *Habitus: Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Antropologi*, vol. 7 no. 2, 2023, hlm. 65-83.

karena persamaan pengalaman, nilai, dan kepercayaan. Sementara itu, struktur sosial solidaritas organik lebih beragam, terdapat spesialisasi pekerjaan, dan saling ketergantungan satu sama lain. Sistem sosial dalam solidaritas mekanik didasarkan pada nilai-nilai tradisional dengan penekanan pada keseragaman dan kepatuhan. Untuk solidaritas organik, sistem sosial yang berkembang lebih kompleks, dinamis, dan dituntut tanggung jawab atas peran mereka dalam sistem.¹⁴⁴ Apabila dihubungkan dengan struktur dan sistem organisasi, solidaritas mekanik mempunyai kecenderungan yang kaku dan terstruktur, sedangkan solidaritas organik lebih bersifat fleksibel, adaptif dan terdesentralisasi.¹⁴⁵

Pada akhirnya tidak lengkap rasanya membahas mengenai partisipasi masyarakat Indonesia masa revolusi tanpa mengaitkannya dengan konsep nasionalisme. Kahin berpendapat bahwa revolusi Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nasionalisme Indonesia. Menurut Kahin, nasionalisme Indonesia adalah gerakan yang lahir dari perubahan sosial akibat kolonialisme, didorong oleh kaum terpelajar, dan bertujuan menciptakan negara republik demokratis, meninggalkan feodalisme, serta mempersatukan berbagai elemen bangsa untuk

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ Tom Burn and G.M. Stalker, *The Management of Innovation*, (London: Tavistock Publications, 1961); lihat pula Bagus Riyono, "Konsep dasar dalam Mendesain Organisasi", *Buletin Psikologi*, vol. 4 no. 1, 2006, hlm. 43-67.

mencapai kemerdekaan dan kesejahteraan.¹⁴⁶ Sementara itu, ben Anderson melihat Nasionalisme Indonesia sebagai “*imagined community*” atau komunitas terbayang, dimana masyarakat yang tidak saling mengenal tetapi memiliki kesadaran akan kesamaan dan persatuan.¹⁴⁷ Menurut Karl Hack identitas lokal memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan nasionalisme. Berdasarkan identitas lokal, nasionalisme terbagi ke dalam 2 tingkatan, yaitu supra-bangsa dan supra-nasionalisme.¹⁴⁸ Menurut Karl Hack, masyarakat yang baru mencapai nasionalisme pada tingkatan supra-bangsa, akan memetingkan kepentingan lokal daripada negara, sedangkan yang sudah mencapai supra-nasionalisme akan mementingkan negara daripada kepentingan lokal.¹⁴⁹ Menurut Bambang Purwanto, nasionalisme yang berkembang di Indonesia adalah nasionalisme negara bukan nasionalisme populer yang berakar kuat pada masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pembentukan negara Indonesia terlebih dulu dilakukan sebelum adanya konsolidasi terhadap

¹⁴⁶ George Turnan Kahin, *loc. cit.*

¹⁴⁷ Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, (New York: Varco, 2003), hlm. 1-8.

¹⁴⁸ Supra-bangsa adalah nasionalisme yang didasarkan pada pelestarian identitas lokal dan juga mencari pengaruh dalam membentuk masa depan bersama bagi keseluruhan negara. Supra-nasionalisme merupakan nasionalisme yang lebih mementingkan kepentingan bersama sebagai sebuah negara. Lihat Karl Hack, “Decolonization and violence in Southeast Asia Crises of identity and Authority” in Els Bogaerts And Remco Raben, ed. *Beyond Empire and Nation: The Decolonization of African and Asian societies, 1930s-1970s* (Brill: 2012), hlm. 140.

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 141-144.

bangsa atau suku-suku di wilayah Indonesia.¹⁵⁰ Hal ini berakibat pada munculnya gejala etnik dan idiologi yang muncul sejak awal kemerdekaan Indonesia. Hal ini berakibat pula pada tinggi rendahnya partisipasi rakyat yang berbeda-beda dalam upaya mengumpulkan dana untuk perjuangan.

1.6 METODE PENELITIAN DAN SUMBER

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah merupakan usaha-usaha sejarawan dalam “pemburuan” jejak-jejak masa lampau yang oleh masa kini dianggap sebagai sumber sejarah. Dalam “pemburuan” tersebut menurut Gilbert J. Garraghan harus berdasarkan prinsip-prinsip yang sistematis dan seperangkat aturan-aturan untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis dan menyajikan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis¹⁵¹. Dengan nada yang sama Ernst Bernheim mengkategorikan metode penelitian sejarah menjadi empat langkah, yaitu: 1. *Heuristik* (menghimpun sumber-sumber sejarah); 2. *Kritik* (menguji atau menilainya); 3. *Auffassung* (memahami makna yang sebenarnya dari sumber-sumber atau bukti-bukti

¹⁵⁰ Bambang Purwanto, “Memahami Kembali Nasionalisme Indonesia”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 4, No. 5, Maret 2001, hlm. 249-250.

¹⁵¹ Gilbert J. Garraghan S.J., *A Guide to Historical Method* (New York: Fordham University Press, 1957), hlm. 33.

sejarah); 4. *Darstellung* (penyajian pemikiran baru berdasarkan bukti-bukti yang telah dinilai dalam bentuk tertulis).¹⁵²

Jejak-jejak masa lampau sebagai sumber sejarah dibagi menjadi 2, yaitu : Sumber primer dan Sumber Sekunder, bahkan biasanya di tambah satu lagi, yaitu sumber tersier di samping metode *oral history*. Sumber-sumber primer didapatkan dari berbagai macam tempat, seperti di Arsip Nasional RI, Perpustakaan Nasional RI, Arsip Angkatan Darat Bandung, DPAD Jawa Tengah, DPAD Yogyakarta, DPAD Jawa Timur, DPAD Jawa Barat, Museum perjuangan Semarang, Perpustakaan Rekso Pustoko Mangkunegaran Surakarta, Arsip Pakualaman Yogyakarta, dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini sumber arsip yang diperoleh dari Arsip Nasional Republik Indonesia, antara lain arsip-arsip dari Kementerian Dalam negeri tahun 1945-1950;¹⁵³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1945-1949;¹⁵⁴ Bank Negara Indonesia, 1945-1952;¹⁵⁵ Kepolisian Republik Indonesia, 1947-1949;¹⁵⁶

¹⁵² Ernst Bernheim, *Lehrbuch der Historischen Methode Und der Geschichtsphilosophie* dimuat oleh: T. Ibrahim Alfian, "Pengantar Metode Penelitian Sejarah" , bahan kuliah, 1990, hlm. 14.

¹⁵³ *Inventaris Arsip Dalam Negeri Periode 1945-1949*, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 1987.

¹⁵⁴ *Inventaris Arsip Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1945-1949*, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 1995.

¹⁵⁵ *Inventaris Arsip P.T. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 1944-1952*, Arsip Nasional republik Indonesia, Jakarta, 2015.

¹⁵⁶ *Inventaris Arsip Kepolisian Republik Indonesia, 1947-1949*, Arsip Nasional Republik Indonesia, 1995.

Kementerian Penerangan, 1942-1949;¹⁵⁷ dan Djogdja Documenten, 1945-1949.¹⁵⁸ Selain arsip-arsip dari ANRI diperoleh pula arsip-arsip dari Dinas Sejarah Angkatan Darat di Bandung, DPAD Yogyakarta, arsip dari Puro Pakualaman, Museum Rekso Pustoko Mankunegaran, dan lain sebagainya.

Selain arsip, dipergunakan juga berita-berita koran sejaman. Surat kabar yang banyak digunakan yang sangat membantu merekonstruksi peristiwa revolusi di Jawa Tengah adalah Kedaulatan Rakyat. Surat kabar ini memberikan perspektif nasionalis dan cara pandang dari pemerintah dan rakyat Indonesia mengenai peristiwa revolusi terutama dalam pengumpulan dana untuk perjuangan. Sementara itu, surat-surat kabar yang memberikan perspektif kolonial adalah koran-koran dari Belanda yang dapat diakses melalui situs *delpher*.

Arsip-arsip yang diperoleh dari ANRI terutama arsip kementerian Dalam Negeri dan BNI banyak dipergunakan untuk menjelaskan proses mobilisasi dana yang dilakukan oleh negara, seperti Fonds Kemerdekaan Indonesia, Pinjaman Nasional, dan Undian Negara. Surat Kabar Kedaulatan Rakyat sangat membantu dalam merekonstruksi mobilisasi dana yang dilakukan oleh laskar-

¹⁵⁷ *Daftar Arsip Pamflet dan Foto Kementerian penerangan, 1942-1949*, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2015.

¹⁵⁸ *Daftar Arsip Djogdja Documenten 1945-1949, 1945-1949*, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 1995.

laskar rakyat, seperti Fonds Perjuangan Rakyat, pertunjukan amal, pasar malam dan pasar derma. Surat Kabar Kedaulatan Rakyat juga sangat membantu dalam menjelaskan pengumpulan dana yang dilakukan oleh rakyat sipil, seperti Fonds Perang dan pengumpulan dana secara langsung.

Koran-koran Belanda yang didapat dari situs *delpher* banyak membantu dalam merekonstruksi peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi selama revolusi, seperti peristiwa Ambarawa, perang di Semarang, dan banditisme yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Republik. Selain itu koran-koran Belanda juga membantu menjelaskan pengumpulan dana di daerah pendudukan, seperti Undian atau lotere, perang uang, dan lain sebagainya.

Arsip-arsip dari Kementerian pertahanan dan Angkatan Darat yang disimpan di Dinas Sejarah Angkatan Darat Bandung dapat merekonstruksi aksi-aksi banditisme yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Republik.¹⁵⁹ Arsip dari Puro Pakualaman dan DPAD Yogyakarta¹⁶⁰ membantu menjelaskan mengenai Fonds kemerdekaan Indonesia dan Fond Nasional Indonesia. Arsip dari Perpustakaan Rekso Pustoko Mangkunegaran¹⁶¹ dapat dipergunakan untuk merekonstruksi pengumpulan padi di Jawa

¹⁵⁹ *Arsip Disjarahad Bandung, Kementerian Pertahanan RI.*

¹⁶⁰ *Senerai Arsip Multi Subjek, DPAD DIY.*

¹⁶¹ *Arsip Rekso Pustoko Masa Mangkunegoro VIII.*

Tengah, aksi-aksi banditisme, dan perdagangan candu. Sementara itu, dapur umum dan pasar darurat menggunakan sumber-sumber lisan yang sudah dihimpun dalam beberapa buku oleh peneliti-peneliti terdahulu.

Setelah dari berbagai sumber terkumpul maka pengujian terhadap sumber tersebut perlu dilakukan. Pengujian ini merupakan kritik untuk mengetahui kebenaran dan kredibilitas maupun otentitasnya. Pengujian terhadap kebenaran isinya dan untuk mengetahui kredibilitas sumber yang didapat merupakan kritik "bagian dalam" atau kritik intern, sedangkan kritik ekstern untuk mengetahui "bagian luar" atau otentitasnya, misalnya tentang tintanya, kertas, dan sebagainya. Apabila kritik atau pengujian telah dilakukan dan teks-teks tersebut dipercaya sudah "higienis" maka sumber-sumber yang di anggap benar sudah merupakan fakta. Menurut Louis Gottschalk, fakta merupakan suatu yang dijabarkan secara langsung dari dokumen-dokumen sejarah yang dianggap kredibel setelah melalui pengujian seksama atas dasar hukum-hukum metode sejarah.¹⁶² Unsur yang kredibel bukanlah "apa yang sungguh-sungguh terjadi" melainkan "unsur yang paling dekat dengan apa yang sungguh-sungguh terjadi". Sejarawan menetapkan "apa yang nampak benar" sudah dianggap "yang benar" sebagai kebenaran yang relatif sifatnya.

¹⁶² Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 95.

Sebagaimana pernyataan dari Isaiah Berlin, "kebenaran yang realitas tidak harus ekuivalen dengan kebenaran kita".¹⁶³ Pernyataan semacam ini bisa diterima sejarawan yang maklum akan hakekat fakta yang subyektif karena memuat unsur dari subyek. Sebagaimana Sartono Kartodirdjo mengatakan bahwa fakta-fakta merupakan produk dari proses mental (sejarawan) atau memorisasi dan hasil dari konstruksi subyek.¹⁶⁴ Oleh karena itu, tidak aneh apabila Becker berkata, "fakta historis berada di benak peneliti sejarah yang terlibat dalam diskusi mengenai fakta historis yang bersangkutan."¹⁶⁵

Fakta sebagai hasil "kebenaran" dari sumber sejarah setelah melalui pengujian yang kritis tidak akan bermakna tanpa dianalisis oleh sejarawan atau orang yang terlibat dalam proses rekonstruksi.. Robert F. berkhofer, Jr., seorang maha guru sejarah dari Amerika Serikat mengemukakan bahwa tujuan analisis sejarah adalah sintesis dari sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta-fakta itu ke dalam suatu intepretasi yang

¹⁶³ Sir Isaiah Berlin, "Historical Inevitability", in Hans Meyerhoff, ed., *The Philosophy of History in Our Time* (New York: Doubleday & Company Inc., 1959), hlm. 249-272.

¹⁶⁴ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial dalam metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 17.

¹⁶⁵ Carl L. Becker, "What Are Historical fact?" in Hans Meyerhoff, *op. cit.*, hlm. 121.

menyeluruh.¹⁶⁶ Dengan "nada" yang sama, Sartono Kartodirdjo menggambarkan penyusunan sintesis sebagai "pembangunan sebuah bangunan". Fakta-fakta sebagai "batu merah" dengan perekat imajinasi sebagai "semen"nya disusun sesuai dengan "disain" atau blueprint berdasarkan kerangka berpikir atau referensi. Perangkaian fakta yang direkatkan imajinasi dibutuhkan kemampuan berpikir logis (*diskursif*) dengan konsep-konsep dan teori sebagai alat analitisnya.¹⁶⁷

Proses penyusunan sintesis dari sejumlah fakta ini tidak akan pernah ada tanpa eksplanasi. Komponen dari eksplanasi terdiri dari *eksplanandum* yaitu statemen yang harus dijelaskan dan *eksplanan* yang merupakan sejumlah statemen untuk menerangkan. Menurut Eugene J. Mehan, eksplanasi adalah proses yang melalui peristiwa-peristiwa tunggal (*explicanda*) dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa lain melalui penggunaan persyaratan-persyaratan umum yang tepat.¹⁶⁸ W.H. Walsh berpendapat bahwa eksplanasi kaum historis didasarkan pada suatu pandangan bahwa setiap peristiwa mempunyai keunikan dan

¹⁶⁶ Robert F. berkhofer, Jr., *A Behavioral Ahlmroach to Historical Analysis*, (New York: The Free Press, 1969), p.21

¹⁶⁷ Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hal. 18-19

¹⁶⁸ Eugene J. Meehan, *The Structuralis Science as Philosophy* (Oxford : oxford University Press, 1973) dikutip oleh T. Ibrahim Alfian, "Sebuah Catatan Tentang Masalah Eksplanasi dalam Disiplin Sejarah" Yogyakarta : makalah seminar, 1989).

individualitas. Kejadian sejarah pada hakekatnya berhubungan. Setiap peristiwa merupakan mata rantai atau rentetan sebab akibat dengan pengertian bahwa setiap akibat menjadi sebab peristiwa berikutnya dan seterusnya. Dalam eksplanasi sejarah, sejarawan diharapkan untuk memberi interpretasi ¹⁶⁹

Menurut Berkhofer, eksplanasi dilihat untuk membahas suatu statemen tentang fenomena yang dipahami dengan menghubungkan fenomena tersebut dengan statemen yang lain. Lebih lanjut Berkhofer berpendapat bahwa karena luasnya arti maka eksplanasi lebih baik mengkhususkan pada “caution” pada acuan untuk menghubungkan sintesa yang berasal dari fakta.¹⁷⁰

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Disertasi ini dibangun dari pembahasan yang terdiri dari 6 bab yang satu sama lain saling terkait, terhubung, dan saling mendukung. Bab I dan II merupakan bagian yang penting dalam menyajikan desain penelitian dan pemikiran serta struktur-struktur penting yang mendukung narasi pada bagian isi yang terdapat pada bab III, IV, dan V. Penulisan ditutup pada bab VI yang merupakan kesimpulan.

¹⁶⁹ W.H. walsh, *An Introduction to Philosophy of History* (London: Hutchinson University Library, 1967), chapter III

¹⁷⁰ Robert F. Berkhofer, Jr., *op. cit.*, p. 270-271

Bab I merupakan pendahuluan yang menjadi pondasi dan dasar pemikiran disertasi ini dikerjakan. Dalam pendahuluan ini berisi alasan yang mendasari penting dan perlunya penelitian ini dilakukan, manfaat dan tujuan penelitian, kajian pustaka dan historiografi, dasar pemikiran yang terhimpun dalam kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang struktur politik, sosial, dan ekonomi Jawa Tengah sebelum dan selama revolusi. Pada bab ini ditekankan posisi Jawa Tengah dalam percaturan politik dan ekonomi selama masa revolusi dan kedudukan Jawa Tengah sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia. Dengan kedudukannya itu, kebijakan dan peristiwa nasional beririsan tipis dengan kejadian-kejadian di Jawa Tengah, demikian juga sebaliknya.

Bab III merupakan bab isi yang dimulai pembahasannya tentang pengumpulan dana Perjuangan oleh negara. Pada bab ini diperlihatkan negara Republik Indonesia yang baru merdeka sangat lemah dalam memobilisasi dana, sehingga bentuk-bentuk pengumpulan dana masih menggunakan bentuk-bentuk pengumpulan dana pada masa-masa sebelumnya. Hal ini beralasan, karena pemerintah RI yang baru berdiri ingin segera mendapatkan dana, sehingga yang bisa dilakukan adalah meniru bentuk-bentuk pengumpulan dana yang terjadi pada masa sebelumnya. Mobilisasi dana dalam bentuk penyelenggaraan Fonds Kemerdekaan Indonesia (FKI) dan pengumpulan padi merupakan

kebijakan pengumpulan dana yang meneruskan kebijakan pada masa pendudukan Jepang. Pengumpulan dana berupa undian atau lotere dan perdagangan opium meneruskan kebijakan pada masa kolonial Belanda.

Bab IV merupakan pengumpulan dana yang dilakukan oleh masyarakat sipil bersenjata. Dengan kondisi negara yang masih lemah, badan-badan perjuangan atau kelompok-kelompok sipil bersenjata mempunyai keleluasaan untuk berpartisipasi dalam pengumpulan dana. Bentuk-bentuk pengumpulan dana oleh laskar-laskar rakyat lebih kreatif dan lebih menghibur masyarakat, seperti pertunjukan amal, pertandingan amal, pasar malam, dan pasar derma. Hal ini sangat memungkinkan karena laskar-laskar rakyat kebanyakan memobilisasi pengumpulan dana pada waktu setelah agresi militer Belanda I hingga sebelum terjadinya agresi militer belanda II. Waktu diantara dua agresi itu merupakan waktu yang paling aman di daerah republik. Akan tetapi, untuk daerah-daerah di wilayah garis demarkasi, kata “aman” tidak pernah terjadi. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pejuang-pejuang republik melakukan aksi-aksi banditisme di wilayah-wilayah pendudukan Belanda.

Bab IV merupakan pengumpulan dana oleh masyarakat sipil. Masyarakat sipil sebenarnya sudah sejak awal berpartisipasi dan berperan penting dalam menyumbang dana untuk negara. Setelah agresi militer Belanda II, ibu kota Yogyakarta dan kota-kota penting

di Jawa dikuasai oleh Belanda, peranan masyarakat desa dalam “menghidupi” pejuang-pejuang yang sedang bergerilya sangat besar. Selain menyelenggarakan fonds yaitu fonds perang, masyarakat juga menyelenggarakan dapur umum dan pasar dadakan. Selain itu masyarakat juga menyumbang secara langsung, karena fonds-fonds yang ada sudah tidak berfungsi. Tulisan ini ditutup pada bab VI yang merupakan Kesimpulan atau jawaban ringkas dari apa yang ditanyakan pada bab pendahuluan.